

2020

LAPORAN KINERJA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
GORONTALO

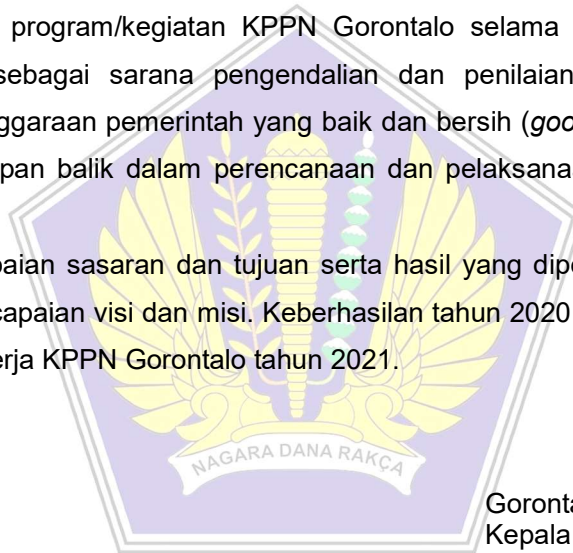
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada KPPN Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2020. LAKIN KPPN Gorontalo Tahun 2019 disusun guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi KPPN Gorontalo serta Rencana Strategis KPPN Gorontalo. Pada LAKIN KPPN Gorontalo ini dijelaskan upaya dalam meraih keberhasilan, mengatasi hambatan serta jalannya pelaksanaan program/kegiatan KPPN Gorontalo selama tahun 2020. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2020 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan tahun 2020 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja KPPN Gorontalo tahun 2021.



Gorontalo, 28 Januari 2021
Kepala KPPN

Toni Rediyansyah

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Gorontalo 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis KPPN Gorontalo dan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LAKIN KPPN Gorontalo Tahun 2020 ini pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian tugas/sasaran strategis instansi selama tahun 2020.

Maksud dan tujuan pembuatan LAKIN adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya (*good governance*) yang dilandasi tugas dan fungsi KPPN Gorontalo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya. Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang dilakukan selama kurun waktu satu tahun. Dalam organisasi pemerintah, proses penyusunan Laporan Kinerja tersebut harus dilakukan secara integral.

Dalam mencapai sasaran agar kebijakan, program, dan seluruh kegiatan dapat terarah diperlukan suatu visi. KPPN Gorontalo mempunyai visi yaitu: “Menjadi Pengelola Perbendaharaan di Daerah yang Profesional, Modern, Transparan, dan Akuntabel”.

Untuk mewujudkan visi tersebut KPPN Gorontalo menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Layanan Perbendaharaan yang Profesional, Modern, dan Transparan
2. Mewujudkan Pengelolaan Kas yang *Prudent*, Efisien, dan Optimal
3. Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu
4. Mengembangkan Kapasitas Pendukung Sistem Perbendaharaan yang Andal, Profesional, dan Modern

KPPN Gorontalo mempunyai tujuan yaitu menatausahakan dana APBN secara cepat, tepat, dan akurat dengan pelayanan prima melalui sistem informasi yang transparan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut KPPN Gorontalo mempunyai sasaran strategis antara lain: pelaksanaan belanja negara yang optimal dan proposional; pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; pemenuhan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi;

kepatuhan penggunaan layanan yang tinggi, pelayanan prima, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat, peningkatan pemahaman mitra kerja, optimalisasi monitoring dan evaluasi, pengembangan SDM yang berkompetensi tinggi, optimalisasi sistem pengelolaan kinerja.

Tingginya tingkat ekspektasi kepuasan pelanggan yang sering tidak berbanding lurus dengan tingkat pemahaman dan respon satker mitra kerja atas aturan dan aplikasi terbaru merupakan tantangan KPPN Gorontalo sehingga diperlukan perencanaan, koordinasi, dan komunikasi yang lebih intensif lagi antara KPPN Gorontalo, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, serta satker mitra kerja.

Pencapaian kinerja KPPN Gorontalo pada tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 92,59 dari target 88.
2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas terealisasi sebesar 99,68 dari target 94.
3. Presentase akurasi perencanaan kas KPPN terealisasi sebesar 99.83% dari target 80%.
4. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terealisasi sebesar 4,56 dari target 4,55.
5. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas terealisasi sebesar 3.68 dari target 3.
6. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu terealisasi sebesar 99,67% dari target 99,4%.
7. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 91.3 dari target 87.
8. Persentase penyampaian LPJ Bendahara secara tepat waktu terealisasi sebesar 99,82% dari target 98%.
9. Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa terealisasi sebesar 96,53 dari target 80.
10. Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI terealisasi sebesar 100% dari target 100%.
11. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi sebesar 99.91% dari target 98,1%.
12. Nilai rata-rata *hard competency* pegawai terealisasi sebesar 86,83 dari target 77.
13. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 99.59 dari target 80.
14. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* terealisasi sebesar 90,85 dari target 83.
15. Nilai rata-rata pelaksanaan literasi perbendaharaan terealisasi sebesar 79.2 dari target 74.

16. Persentase pengelolaan BMN yang optimal terealisasi sebesar 97,52% dari target 92%.
17. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB terealisasi sebesar 93,3 dari target 81.
18. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN terealisasi sebesar 96,02% dari target 95%.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja (LAKIN) menghasilkan laporan yang akurat, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan dan pegawai tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai yang kemudian hal tersebut dijadikan landasan/acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis.....	3
D. Sistematika Laporan.....	7
Bab II Perencanaan Kinerja	9
A. Rencana/Ikhtisar Perjanjian Kinerja	9
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja.....	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
Capaian Kinerja Organisasi.....	18
1. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2020	18
2. Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi	19
3. Capaian Setiap Perspektif.....	19
4. Tabel Nilai Kinerja Organisasi.....	23
5. Sasaran Strategis	18
6. Penjelasan Capaian IKU	25
7. Inisiatif Strategis	87
Realisasi Anggaran	88
Kinerja Lainnya	89
1. Inovasi Manajemen/Pelayanan	89
2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi	97
3. Penghargaan	99
Bab IV Penutup	101
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Organisasi KPPN Tipe A1	2
2.1 Peta Strategi dan Sasaran Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2020	14
3.1 Peta Strategi KPPN Gorontalo 2020	26
3.2 Aplikasi Telegram	90
3.3 Aplikasi Manjo	90
3.4 Aplikasi Manjo	90
3.5 Aplikasi Mini KPPN	91
3.6 Aplikasi Mini KPPN	91
3.7 Si Weruh	92
3.8 Si Jaga	93
3.9 <i>Treasury Classroom</i> KPPN Gorontalo	26
3.10 Kopen	95
3.11 Sareo	96
3.12 Rombukiya	97
3.13 Rombukiya	97
3.14 Penandatanganan Pakta Integritas	98
3.15 Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia	99
3.16 Perolehan Predikat Wilayah Bebas Korupsi	99



DAFTAR TABEL

1.1 Statistik Pegawai KPPN Gorontalo	3
2.1 Proyeksi Target Kinerja Kinerja KPPN Gorontalo	11
2.2 Tabel Perjanjian Kinerja KPPN Gorontalo Tahun 2020	14
2.3 Inisiatif Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2020	15
3.1 Bobot Perspektif	18
3.2 Rekapitulasi Nilai Perspektif KPPN Gorontalo	18
3.3 <i>Stakeholder Perspective</i>	20
3.4 <i>Customer Perspective</i>	20
3.4 <i>Stakeholder Perspective</i>	20
3.5 <i>Internal Process Perspective</i>	21
3.6 <i>Learning and Growth Perspective</i>	22
3.7 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo 2020	23
3.8 IKU SS Pengelola Perbendaharaan Yang Akuntabel	27
3.9 IKU SS Birokrasi dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif dan Efisien	27
3.10 IKU SS Perumusan Regulasi dan Otorisasi Yang Optimal	28
3.11 IKU SS Komunikasi dan Edukasi Yang Berkesinambungan	28
3.12 IKU SS Pengelolaan Perbendaharaan Yang Pruden dan Optimal	29
3.13 IKU SS Monev Perbendaharaan	29
3.14 IKU SS Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara Yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu	30
3.15 IKU SS Pengelolaan Organisasi dan SDM Yang Optimal	30
3.16 IKU SS Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Optimal	28
3.17 Penjelasan Capaian IKU IKPA	35
3.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKU IKPA	36
3.19 Perbandingan Target dan Realisasi IKU LK UAKPA	38
3.20 Penjelasan Capaian IKU IKPA	38
3.21 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Akurasi PPDH	40
3.22 Penjelasan Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN	41
3.23 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN ...	42
3.24 Penjelasan Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas	43
3.25 Penjelasan Capaian IKU Penyelesaian SP2D Tepat Waktu	46
3.26 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Penyelesaian SP2D Tepat Waktu	46
3.27 Penjelasan Capaian IKU Edukasi dan Komunikasi	48

3.28 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Edukasi dan Komunikasi	48
3.29 Penjelasan Capaian IKU LPJ	50
3.30 Perbandingan Target dan Realisaasi LPJ Bendahara	51
3.31 Penjelasan Capaian IKU DAK dan Dana Desa	56
3.32 Penjelasan Capaian Sakti	60
3.33 Penjelasan Capaian IKU Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	63
3.34 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Rekonsiliasi UAKPA	64
3.35 Penjelasan Capaian IKU <i>Hard Competency</i>	65
3.36 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Edukasi dan Komunikasi	66
3.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tugas Kepatuhan Internal	68
3.38 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Edukasi dan Komunikasi	70
3.39 Kategori Penulisan Literasi Eselon 4 KPPN Gorontalo	74
3.40 Penjelasan Capaian IKU Literasi	74
3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Literasi	75
3.42 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Edukasi dan Komunikasi	78
3.43 Penjelasan Capaian IKU LK UAKPA/UAKPB	80
3.44 Penjelasan Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	85
3.45 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	86
3.16 Pagu dan Realisasi Belanja KPPN Gorontalo 2016-2020	89



DAFTAR GRAFIK

3.1 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo 2016-2020	19
3.2 Capaian IKU IKPA 2016-2020	35
3.3 Capaian IKU LK UAKPA 2016-2020.....	37
3.4 Capaian IKU Akurasi PPDH 2016-2020	40
3.5 Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2016-2020.....	42
3.6 Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2016-2020.....	46
3.7 Capaian IKU Edukasi dan Komunikasi 2016-2020.....	48
3.8 Capaian IKU LPJ Bendahara 2016-2020	50
3.9 Capaian IKU DAK dan Dana Desa KPPN 2016-2020.....	56
3.10 Capaian IKU SAKTI 2016-2020	61
3.11 Capaian IKU Rekonsiliasi UAKPA 2016-2020.....	64
3.12 Capaian IKU <i>Hard Competency</i> 2016-2020	66
3.13 Capaian IKU Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2016-2020	68
3.14 Capaian <i>IKU Strategy Focused Organization</i> 2016-2020	70
3.15 Capaian IKU Literasi 2018-2020	75
3.16 Capaian IKU Pengelolaan BMN 2016-2020	78
3.17 Capaian IKU Pelaksanaan Anggaran 2016-2020.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2020 disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. LAKIN disusun berdasarkan realisasi capaian IKU Kemenkeu-Tree sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja tahun 2020. LAKIN juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPPN sebagai instansi vertikal DJPb yang sepenuhnya dan sebenar-benarnya menunjukkan kinerja KPPN.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Perbendaharaan dan Bendaharawan Umum Negara (BUN), Penyaluran Pembiayaan atas Beban Anggaran, serta Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut KPPN Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

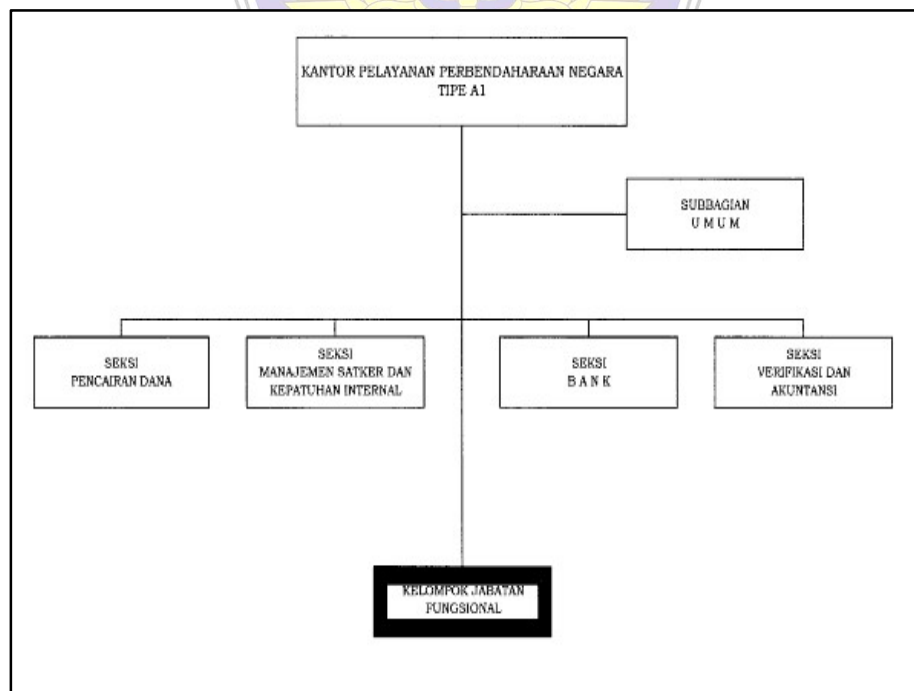
1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);

11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*treasury management representative*);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. pengelolaan rekening pemerintah;
15. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
19. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (PIK); dan
20. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN Gorontalo merupakan KPPN Tipe A1 yang terdiri dari:

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Seksi Pencairan Dana;
- 3) Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal;
- 4) Seksi Bank;
- 5) Seksi Verifikasi dan Akuntansi; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Bagan Organisasi KPPN Tipe A1



Pada 31 Desember 2020, jumlah pegawai KPPN Gorontalo sejumlah 24 orang yang terdiri dari 7 perempuan dan 17 laki-laki.

Tabel 1.1
Statistik Pegawai KPPN Gorontalo

Seksi		Jenis Kelamin	Jumlah
Kepala Kantor		Laki-Laki	1
Fungsional		Laki-Laki	2
Subbagian Umum	Kepala Subbagian	Laki-Laki	1
	Pelaksana	Laki-Laki	2
		Perempuan	2
Seksi Pencairan Dana	Kepala Seksi	Laki-Laki	1
	Pelaksana	Laki-Laki	3
		Perempuan	2
Seksi MSKI	Kepala Seksi	Laki-Laki	1
	Pelaksana	Laki-Laki	2
		Perempuan	0
Seksi Bank	Kepala Seksi	Laki-Laki	1
	Pelaksana	Laki-Laki	2
		Perempuan	2
Seksi Vera	Kepala Seksi	Laki-Laki	1
	Pelaksana	Laki-Laki	1
		Perempuan	1
TOTAL PEGAWAI			24

Berdasarkan data Analisis Beban Kerja, ABK KPPN Gorontalo seharusnya berjumlah 27 orang, akan tetapi kurangnya pegawai tidak membuat kinerja KPPN Gorontalo menurun. KPPN Gorontalo terus meningkatkan kinerjanya baik dengan pelatihan formal seperti *e-learning*, *focus group discussion*, maupun sosialisasi-sosialisasi dan pelatihan informal seperti *capacity building* untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama seluruh pegawai.

C. Peran Strategis KPPN Gorontalo

Peran strategis KPPN Gorontalo selaras dengan tugas yang diembannya yaitu :

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
2. Melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran; dan

3. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang dijalankan oleh KPPN Gorontalo juga merupakan implementasi dari kebijakan yang merupakan turunan dari kebijakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penjabaran dari kebijakan dan strategi tersebut meliputi:

1. Aspek Pelaksanaan Anggaran

- a. Ditinjau dari aspek pelaksanaan anggaran, KPPN merupakan garda terdepan dalam implementasi kebijakan fiskal, khususnya belanja pemerintah. Dengan demikian, baik buruknya kualitas pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan di KPPN akan ikut mempengaruhi tingkat penyerapan serta pola penyerapan belanja pemerintah. Dengan adanya SPAN dan menyusul segera diimplementasikan SAKTI maka seluruh prosedur pencairan dana menjadi modern, sederhana, aman, dan terintegrasi. Hal berikutnya yang menjadi krusial adalah kesiapan dari para pengelola keuangan di satker. Peningkatan Fungsi manajemen satker di KPPN merupakan strategi yang tepat. Jika kompetensi dan kapasitas satker cukup baik maka risiko perubahan yang telah dicanangkan semakin berkurang.
- b. Dampak dari pola penyerapan anggaran yang tidak proporsional dan tidak sesuai dengan perencanaan akan sangat berpengaruh tidak hanya pada kekokohan fiskal, namun juga terhadap stabilitas keuangan serta pergerakan roda perekonomian di sektor riil. Pada akhirnya, hasil dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran ini dapat berfungsi sebagai masukan dalam proses perencanaan anggaran periode berikutnya maupun dalam rangka *reward* dan *punishment* kepada kementerian/lembaga.

2. Aspek Pengelolaan Kas

- a. Di bidang pengelolaan kas, peran Ditjen Perbendaharaan sangat signifikan karena dapat menentukan besaran beban utang pemerintah, arah, dan strategi pembiayaan dan utang, keputusan dan kebijakan lain terkait transaksi Surat Berharga Negara (SBN) termasuk *issuance*, *buyback*, *swap*, *debt switch*, dan lainnya. Dengan konsep *Asset Liability Management* (ALM) maka keterkaitan antara *Debt Management* dan *Cash Management* semakin konkrit dan jelas.
- b. Dalam hal perencanaan kas, Ditjen Perbendaharaan berperan dalam menentukan aliran kas keluar sehingga dapat menentukan dan merencanakan dengan baik kebutuhan untuk membiayai kekurangan kas yang mungkin terjadi.
- c. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu sehingga dapat memperkirakan terjadinya surplus atau defisit sedini mungkin.

3. Aspek Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah

- a. Peranan yang tidak kalah penting yang dilaksanakan oleh KPPN adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaan dana APBN, baik laporan keuangan kementerian/lembaga selaku pengguna anggaran, maupun laporan keuangan pemerintah selaku Bendahara Umum Negara bendahara umum negara.
 - b. Sesuai pasal 1 Undang-Undang 15 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Peran ini dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dari tingkat KPPN (Satuan Kerja), tingkat Kantor Wilayah, sampai tingkat Kantor Pusat (Eselon I).
 - c. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standard Akuntansi Pemerintahan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, maka tahun 2014 adalah tahun terakhir penerapan akuntansi berbasis cash toward acrual. Mulai tahun 2015 pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah harus sudah menggunakan akuntansi berbasis akrual. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi motor penggerak penyusunan laporan sekaligus pembina kementerian negara/lembaga untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual.
4. Aspek Modernisasi Pengelolaan Keuangan Negara
- a. Dengan diimplementasikannya Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN) awal Januari 2015 sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang modern dengan dukungan informasi teknologi yang terkini menjadikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pionir terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang efisien, transparan, dan akuntabel.
 - b. Kemudahan dan percepatan layanan terkait pencairan/realisasi APBN menjadikan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan penting dalam percepatan pembangunan.

Berdasarkan data peran strategis DJPB, KPPN Gorontalo telah melakukan langkah-langkah strategis dan inovasu pada tahun 2020 untuk meningkatkan perekonomian dan mempermudah satker-satker dalam melakukan pelayanan di KPPN, seperti:

1. Penyaluran DAK dan Dana Desa

KPPN Gorontalo selaku Pengelola Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, melaksanakan penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS di wilayah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara

dan Kota Gorontalo. Pada tahun 2020, KPPN Gorontalo telah menyalurkan DAK Fisik sebesar Rp.456.700.109.584 yaitu 95.33% dari pagu DAK Fisik sebesar Rp.479.080.057.000, Dana Desa sebesar Rp.456.856.876.138 yaitu 99.97% dari pagu Dana Desa sebesar Rp.456.990.085.000, dan Dana BOS (DAK Non Fisik) sebesar Rp.268.448.490.000 yaitu 97.69% dari pagu Dana BOS sebesar Rp.274.778.270.000. Seluruhnya telah kami salurkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.182.005.475.722 yaitu 97.61% dari total pagu sebesar Rp.1.210.848.412.000. Untuk memastikan penyaluran sesuai dengan prinsip akuntabilitas, syarat-syarat penyaluran sudah melalui Reviu APIP oleh masing-masing Pemda Daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah.

Di tahun 2020 Dana Desa dan Dana BOS yang disalurkan melalui KPPN Gorontalo, langsung disalurkan ke rekening desa dan rekening sekolah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat realisasi belanja guna mendukung percepatan pembangunan yang menyeluruh. Dengan disalurnkannya Dana Desa dan Dana Bos langsung ke tujuan, desa maupun sekolah dapat langsung menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana kegiatan maupun pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Tantangan di tahun 2020 tidaklah mudah, dengan merebaknya virus corona yang membabi buta, kami telah menyiapkan sistem monitoring online untuk mengakomodir penyerahan syarat penyaluran serta untuk menginput progress output yang telah selesai. Sistem monitoring sudah tersinkron mulai dari level dinas, pemda maupun KPPN, sehingga data tersaji secara update dan real time. Diharapkan penyaluran yang mudah dapat mempercepat pembangunan guna membantu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

2. Inovasi Konfirmasi Penerimaan Negara (KOPEN)

Dampak dari pandemik covid-19 tidak menyurutkan semangat untuk tetap berinovasi. KPPN Gorontalo memberikan layanan Kopen, Konfirmasi Penerimaan Negara Online yang mempermudah satker mitra kerjanya dalam melakukan konfirmasi penerimaan pajak maupun PNBP. Satuan kerja dapat mengirimkan pengajuan konfirmasi setoran penerimaan negara secara online melalui formulir online yang dibuat oleh KPPN Gorontalo. Melalui formulir tersebut, satker mengisi kontak yang dapat dihubungi, nomor surat, hasil scan permohonan berserta lampiran dan arsip data komputer (ADK). Petugas KPPN akan mengecek kelengkapan dokumen dan kesesuaian ADK yang dikirim oleh satuan kerja. Jika sudah sesuai, petugas KPPN akan melakukan konfirmasi penerimaan setoran negara melalui aplikasi OMSPAN. Petugas memberikan hasil konfirmasi kepada satker melalui kontak yang telah diisi melalui formulir. Jika masih

terdapat kesalahan, satuan kerja diharuskan memperbaiki dan menyampaikan dokumen ataupun ADK yang salah.

Tujuan inovasi ini adalah menatausahakan dokumen konfirmasi secara digital dengan mengurangi penggunaan kertas, memastikan kebenaran data konfirmasi satuan kerja sehingga cukup satu kali ke KPPN dan mengurangi biaya perjalanan dinas satuan kerja. Ada beberapa satuan kerja yang harus menempuh perjalanan minimal 1 (satu) jam menuju KPPN. Selain efisiensi biaya, waktu dan tenaga, secara internal, inovasi ini telah di evaluasi dan ditetapkan menjadi salah satu inovasi KPPN Gorontalo tahun 2020.

Secara teori, dengan ini maka dari aspek proses bisnis akan sangat memudahkan pengguna layanan, sebagai contoh untuk pelayanan, kemudian dari sisi efisiensi biaya perjalanan dinas akan sangat menghemat karena tidak ada lagi biaya perjalanan dinas yang diperlukan untuk melakukan konfirmasi penerimaan. Efisiensi dari sisi waktu tunggu Penerimaan pajak (sumber : kemenkeu.go.id/apbn2020) Penerimaan PNPB (sumber : kemenkeu.go.id/apbn2020) satuan kerja juga akan meningkat karena seluruh proses konfirmasi tidak perlu antrian fisik di KPPN.

Gambaran dampak dari inovasi ini: Penghematan biaya, asumsi ada 115 satker KPPN yang mengajukan konfirmasi penerimaan dalam satu bulan x biaya perjalanan kota @150.000,- = 17.250.000,- Dari sisi penghematann biaya perjalanan dinas saja bisa dihemat sekitar Rp. 17.250.000/bulan atau Rp. 207.000.000,- dalam satu tahun anggaran.

3. Penghematan Anggaran Efisiensi Birokrasi

Efisiensi atas belanja birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan fokus pada belanja bahan dan konsumsi serta belanja perjalanan dinas. Total pagu dana setelah revisi penghematan tanggal 13 Mei 2020 pada ketiga jenis belanja tersebut (seluruh output) adalah sebesar Rp 248.624.000. Target yang ditetapkan minimal 10% (Rp 24.862.400 dibulatkan menjadi Rp 25.000.000) Sampai dengan akhir Desember 2020 penghematan yang bisa dilakukan (dana tidak terserap) berjumlah Rp 24.849.875.

D. Sistematika Laporan

LAKIN Tahun 2020 KPPN Gorontalo mempunyai sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan kinerja lainnya.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, baik kinerja utama maupun kinerja lainnya serta menyajikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai implementasi dari Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah ditetapkan, yaitu “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”, maka visi KPPN Gorontalo menyesuaikan dengan ruang lingkup, tugas pokok dan fungsi yang ada. Secara spesifik bahwa tugas KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah dan menjadi kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasanya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Visi ini disusun untuk memberi arah yang jelas dan fokus kepada KPPN Gorontalo sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan organisasi. Visi ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh unsur dalam organisasi sehingga mampu menggerakkan seluruh elemen dari organisasi secara sinergi ke satu arah yang sama.

Visi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo yaitu:

“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel”

Pengelola perbendaharaan negara di daerah artinya KPPN Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sesuai peran dan fungsinya selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

Profesional memiliki makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai di lingkungan KPPN Gorontalo melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Modern artinya dukungan kemajuan Teknologi Informasi digunakan untuk mendukung jalannya proses bisnis untuk memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan.

Transparan dan Akuntabel artinya selalu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan yang dilandasi dengan komitmen dan integritas yang tinggi.

Untuk mewujudkan visinya, KPPN Gorontalo akan mempunyai misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi:

1. Mewujudkan Layanan Perbendaharaan yang Profesional, Modern, dan Transparan

Layanan perbendaharaan yang professional ditujukan untuk memberikan kualitas layanan terbaik dengan dukungan sumberdaya dan sarana/prasarana terbaik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggung jawaban dan jaminan dari profesionalitas layanan perbendaharaan yang telah disampaikan. Ukuran profesional, transparan, dan akuntabel tentu harus ditetapkan dengan standar yang jelas dengan kinerja yang terukur.

2. Mewujudkan Pengelolaan Kas yang *Prudent*, Efisien, dan Optimal

Sebagai pengelola kas negara (*fund manager*), maka penguatan kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif untuk menghindari *cash mismatch*; dan penata usahaan penerimaan negara yang efektif dan akuntabel.

3. Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu

Akuntansi dan pelaporan keuangan diwujudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan negara sejak proses penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta mendukung pengambilan kebijakan strategis organisasi. Pengelolaan keuangan dan kekayaan, utang dan aset pemerintah yang baik tercermin di dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat menggunakan standar akuntansi berbasis akrual, sehingga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat serta internasional.

4. Mengembangkan Kapasitas Pendukung Sistem Perbendaharaan yang Andal, Profesional, dan Modern

Mengimplementasikan peraturan-peraturan di bidang perbendaharaan serta memberikan dukungan teknis di bidang teknologi informasi perbendaharaan dan basis data sesuai *best practice* yang andal, terotomasi, terintegrasi, mudah diterapkan (*applicable*), dan memenuhi aspek keamanan melalui implementasi SPAN, serta penyelenggaraan jabatan fungsional yang mendukung terselenggaranya fungsi-fungsi perbendaharaan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Untuk mewujudkan visi dan misi, KPPN Gorontalo menetapkan Proyeksi Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Restra unit tahun 2015-2019, yaitu:

Tabel 2.1
Proyeksi Target Kinerja KPPN Gorontalo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						UIC
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Profesional, Transparan, dan akuntabel	Pesentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	70%	70%	75%	75%	80%	88%	Seksi: PD dan MSKI
		Nilai LK BUN KPPN yang Berkualitas	92	92	93	94	95	94	Seksi Vera
2.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN	4.06	4.07	4.08	4.09	4.10	4.55	Semua Unit
3.	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepatuhan Pengguna Layanan	3	3	3	3	3	-	Seksi Vera
4.	Pelayanan Prima	Persentase SPM Satker yang Diproses Menjadi SP2D	98%	98%	98%	98%	98%	99.4%	Seksi: PD dan Bank
5.	Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat	Persentase Tingkat Akurasi dan Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi	98%	98%	98%	98%	98%	-	Seksi Bank
		Persentase Retur SP2D	2%	2%	2%	2%	2%	-	Seksi: PD dan Bank
6.	Manajemen Satker yang Berkesinam-	Tingkat Efektivitas Edukasi dan	75	75	75	80	80	87	Seksi MSKI

	bungan	Komunikasi							
7.	Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi	Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN melalui Aplikasi Pembukuan Bendahara secara Andal dan Tepat Waktu	95%	95%	95%	95%	95%	98%	Seksi Vera
		Deviasi antara Rencana dan Penarikan Dana Satker yang Akurat	15%	15%	15%	15%	15%	20%	Seksi: PD dan MSKI
8.	SDM yang Professional dan Berintegritas	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Nilai <i>Hard Competency</i> Baik	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Semua Unit
		Persentase Pegawai yang Mematuhi Kode Etik dan Disiplin Pegawai	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
9.	Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi	Nilai Hasil Evaluasi Penerapan Pemantauan Pengendalian	90	90	90	90	90	80	Seksi MSKI

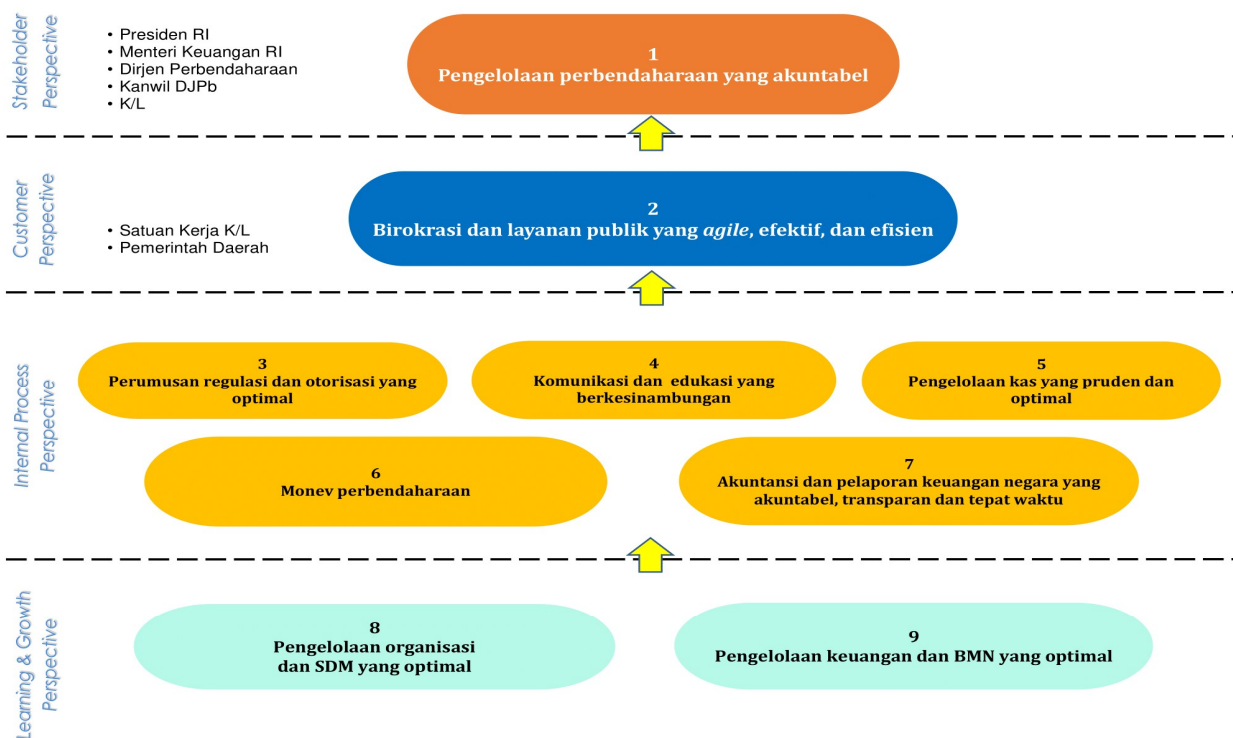
		Intern							
		Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja	75	75	75	75	75	83	Subbag Umum
10.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Persentase Barang Milik Negara dengan Kondisi Baik	95%	95%	95%	95%	95%	92%	Subbagian Umum
11.	Pengelolaan Anggaran yang Optimal	Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian <i>Output</i> Belanja KPPN	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Subbagian Umum

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penetapan kinerja KPPN Gorontalo telah dibuat awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang ditetapkan dan indikator keberhasilan pencapaiannya. Rencana kinerja tersebut merupakan target yang harus dilaksanakan dan akan menjadi ukuran kerja unit masing-masing serta pertanggungjawaban dalam Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Gorontalo pada akhir tahun anggaran, sebagaimana tabel berikut.

Gambar 2.1
Peta Strategi dan Sasaran Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2020



Tabel 2.2

Tabel Perjanjian Kinerja KPPN Gorontalo Tahun 2020

No.	Perspektif	IKU	Target 2020
1.	<i>Stakeholder Perspective</i>	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88
		Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94
		Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%
2.	<i>Customer Perspective</i>	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.55
		Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3
3.		Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.4%
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87

	<i>Internal Process Perspective</i>	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%
		Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80
		Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
		Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1%
4.	<i>Learning dan Growth Perspective</i>	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77
		Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80
		Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83
		Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74
		Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%
		Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%

Tabel 2.3
Inisiatif Strategis KPPN Gorontalo Tahun 2020

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
				Kegiatan	Output		
1.	SS: Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan IKU: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Optimalisasi transaksi pembayaran non tunai di tingkat KPPN	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan transaksi pembayaran non tunai tingkat KPPN Target: Minimal 70% satker wajib KPPN memiliki besaran proporsi UP Tunai ≤ 60%	Q1: Edukasi penggunaan, keamanan, dan pertanggungjawaban transaksi non tunai kepada Satker	Q1: Laporan kegiatan	Januari s.d Desember 2020	Kepala KPPN
				Q2: Monev implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai (KKP) di tingkat KPPN	Q2: Laporan kegiatan		
				Q3: Koordinasi dengan Stakeholder (Perbankan dan KPP)	Q3: Laporan kegiatan		
				Q4: Analisis perkembangan transaksi non Tunai dalam	Q4: Kajian/ Analisis		

				pelaksanaan APBN di tingkat wilayah			
2.	SS: Pengelola an organisasi dan SDM yang optimal IKU: Nilai rata –rata hard competen cy pegawai	Pelaksanaan Coaching and Counseling	Peningkatan kapasitas pegawai	Q1: Coaching and counseling Q2: Coaching and counseling Q3: Coaching and counseling Q4: Coaching and counseling	Q1: 65% Q2: 65% Q3: 65% Q4: 65%	Januari s.d. Desember 2020	Kepala KPPN
3.	SS: Monev perbendaharaan IKU: Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik (BOS) dan Dana Desa	Laporan Monev penyaluran DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Desa	Q1: Monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Desa Q2: Monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Desa Q3: Monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Desa Q4: Monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Desa	Q1: Laporan monev Q2: Laporan monev Q3: Laporan monev Q4: Laporan monev	Januari s.d. Desember 2020	Seksi Bank
4.	SS: Pengelola an keuangan dan BMN yang optimal IKU: Nilai Kualitas LK tingkap UAKPA dan UAKPB	Pelaksanaan GKM dan pelatihan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang	Meningkatnya pemahaman dan kualitas dan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan barang	Q3: GKM penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang	Q4: LK UAKPA dan UAKPB	Triwulan III	Seksi MSKI

5.	SS: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal IKU: Presentase Kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	Efisiensi atas belanja birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan	Tercapainya output kegiatan dengan penerapan efisiensi atas belanja birokrasi: a. belanja bahan percetakan dan konsumsi; b. belanja perjalanan dinas dalam negeri kecuali dalam rangka pelantikan, mutasi, diklat dan bantuan evaluasi non lokal dalam rangka pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai yang terkena dampak bencana alam c. RDL dan konsinyering target minimal 10%	1. Mencapai output yang telah ditetapkan di dalam DIP A TA 2020 minimal sama dengan target 2. melakukan penghematan atas AKUN belanja birokrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan	Q4: Laporan atas efisiensi belanja birokrasi	s.d. Desember 2020	Kasubbag Umum
----	--	---	---	---	--	--------------------	---------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2020

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi. Perhitungan NKO mengacu pada Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dan memperhatikan adanya addendum KK.

Formula menghitung NKO:

$$NKO = \sum (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

Bobot perspektif di lingkungan Kementerian Keuangan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Bobot Perspektif

Perspektif	Bobot
Stakeholder	25%
Customer	15%
Internal Process	30%
Learning and Growth	30%

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2020 adalah 107,76% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rekapitulasi Nilai Perspektif KPPN Gorontalo

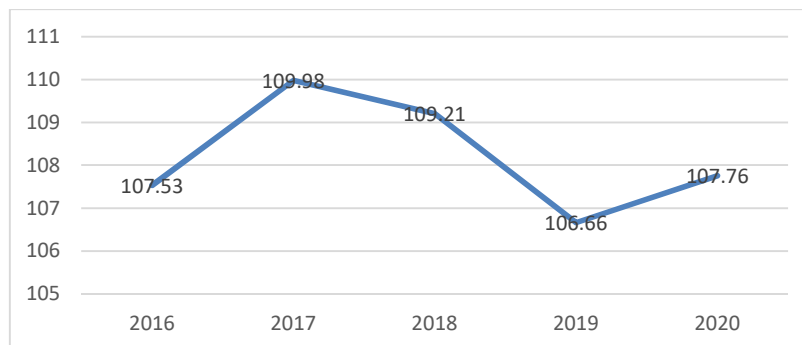
Perspektif	Nilai	Bobot	Hasil
Stakeholder	109.87	25%	27.47
Customer	108.13	15%	16.22
Internal Process	103.69	30%	31.11
Learning and Growth	109.87	30%	32.96
Nilai Kinerja Organisasi			107.76%

2. Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sebesar 107.53, 2017 sebesar 109.8, 2018, NKO KPPN Gorontalo sebesar 109,21%. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,55% menjadi 106,66%, dan naik kembali pada tahun 2020 sebesar 1.1% menjadi 107.76%

Grafik 3.1

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo Tahun 2016 - 2020



3. Capaian Setiap Perspektif

Peta Strategi terdiri dari sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Perspektif adalah cara pandang yang digunakan dalam *Balance Score Card* (BSC) untuk mengelola kinerja organisasi. Ada 4 perspektif dalam BSC Kemenkeu yaitu:

a. Perspektif *Stakeholder*

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

Tabel 3.3
Stakeholder Perspective

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
I Stakeholder Perspektif (25%)									109.87%
1 Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel									109.87%
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88.00	92.59	Max	PL	19%	40.43%	105.21%
2	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94.00	99,68	Max	PM	14%	29,79%	106,04%
3	1b-N	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80.00	99,83	Max	PM	14%	29.79%	120.00%

b. Perspektif Customer

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

Tabel 3.4
Customer Perspective

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
II Customer Perspektif (15%)									108,13%
2 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien									108,13%
4	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,55	4,56	Max	EM	21%	100,00%	100,22%
5	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.00	3.68	Max	PM	14%	40%	120.00%

c. Perspektif Internal Process

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

Tabel 3.5
Internal Process Perspective

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
III Internal Process (30%)									103.69%
3 Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal									100.27%
6	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99.67%	Max	PM	14%	100,00%	100.27%
4 Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan									104,94%
7	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,00%	91,3%	Max	PM	14%	100%	104,94%
5 Pengelolaan kas yang pruden dan optimal									101,86%
8	5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,00	99,82	Max	PM	14%	100,00%	101,86%
6 Monev perbendaharaan									109,55%
9	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80,00	95,28	Max	PM	14%	50,00%	119,10%
10	6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100,00	100,00	Max	PM	14%	50,00%	100,00%
7 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu									101.84
11	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10	99.91	Max	PM	14%	100%	101.84

d. Perspektif *Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

Tabel 3.6
Learning and Growth Perspective

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
IV Learning and Growth Perspektif (30%)									109,87%
8 Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal									112.32%
12	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77,00	86.83	Max	PM	14%	25.00%	112.77%
13	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80.00	99.59	Max	PM	14%	25.00%	120,00%
14	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	83,00	90.85	Max	PM	14%	25.00%	109.46%
15	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74.00	79.2	Max	PM	14%	25.00%	107.03
9 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal									107,41%
16	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92,00	97.52	Max	PM	14%	33,33%	106,00%
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81,00	93.30	Max	PM	14%	33,33%	115,19%
18	9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.00	96.02	Max	PM	14%	33,33%	101.07

4. Tabel Nilai Kinerja Organisasi

Tabel 3.7

Nilai Kinerja Organisasi KPPN Gorontalo 2020

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
I Stakeholder Perspektif (25%)									109.87%
1	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel								109.87%
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88.00	92.59	Max	PL	19%	40.43%	106.87%
2	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94.00	99,68	Max	PM	14%	29,79%	105.76%
3	1b-N	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80.00	99,83	Max	PM	14%	29.79%	
II Customer Perspektif (15%)									108,13%
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								108,13%
4	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,55	4,56	Max	EM	21%	100,00%	100,22%
5	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.00	3.68	Max	PM	14%	40%	120.00%
III Internal Process (30%)									103.69%
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal								100.27%
6	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99.67%	Max	PM	14%	100,00%	100.27%
4	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan								104,94%
7	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,00%	91,3%	Max	PM	14%	100%	104,94%
5	Pengelolaan kas yang pruden dan optimal								101,86%
8	5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang	98,00	99,82	Max	PM	14%	100,00%	101,86%

		andal dan tepat waktu							
6	Money perbendaharaan								109,55%
9	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80,00	95,28	Max	PM	14%	50,00%	119,10%
10	6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100,00	100,00	Max	PM	14%	50,00%	100,00%
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu								101.84
11	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10	99.91	Max	PM	14%	100%	101.84
IV	Learning and Growth Perspektif (30%)								109,87%
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal								112.32%
12	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77,00	86.83	Max	PM	14%	25.00%	112.77%
13	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80.00	99.59	Max	PM	14%	25.00%	120,00%
14	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	83,00	90,85	Max	PM	14%	25.00%	109.46%
15	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74.00	79.2	Max	PM	14%	25.00%	107.03
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal								107,41%
16	9a-N	Persentase pengelolaan	92,00	97.52	Max	PM	14%	33,33%	106,00%

		BMN yang optimal							
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81,00	93.30	Max	PM	14%	33,33%	115,19%
18	9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.00	96.02	Max	PM	14%	33,33%	101.07
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)									107,76%

5. Sasaran Strategis

a. Definisi Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi.

Sasaran Strategis hanya disusun pada unit yang memiliki peta strategi. SS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Singkat dan jelas

Pernyataan SS tidak berupa paragraf atau kalimat. Penjelasan terhadap uraian SS dapat dijelaskan dalam manual IKU. Pernyataan SS tidak memiliki pemahaman ganda dan selaras dengan deskripsi SS pada manual IKU.

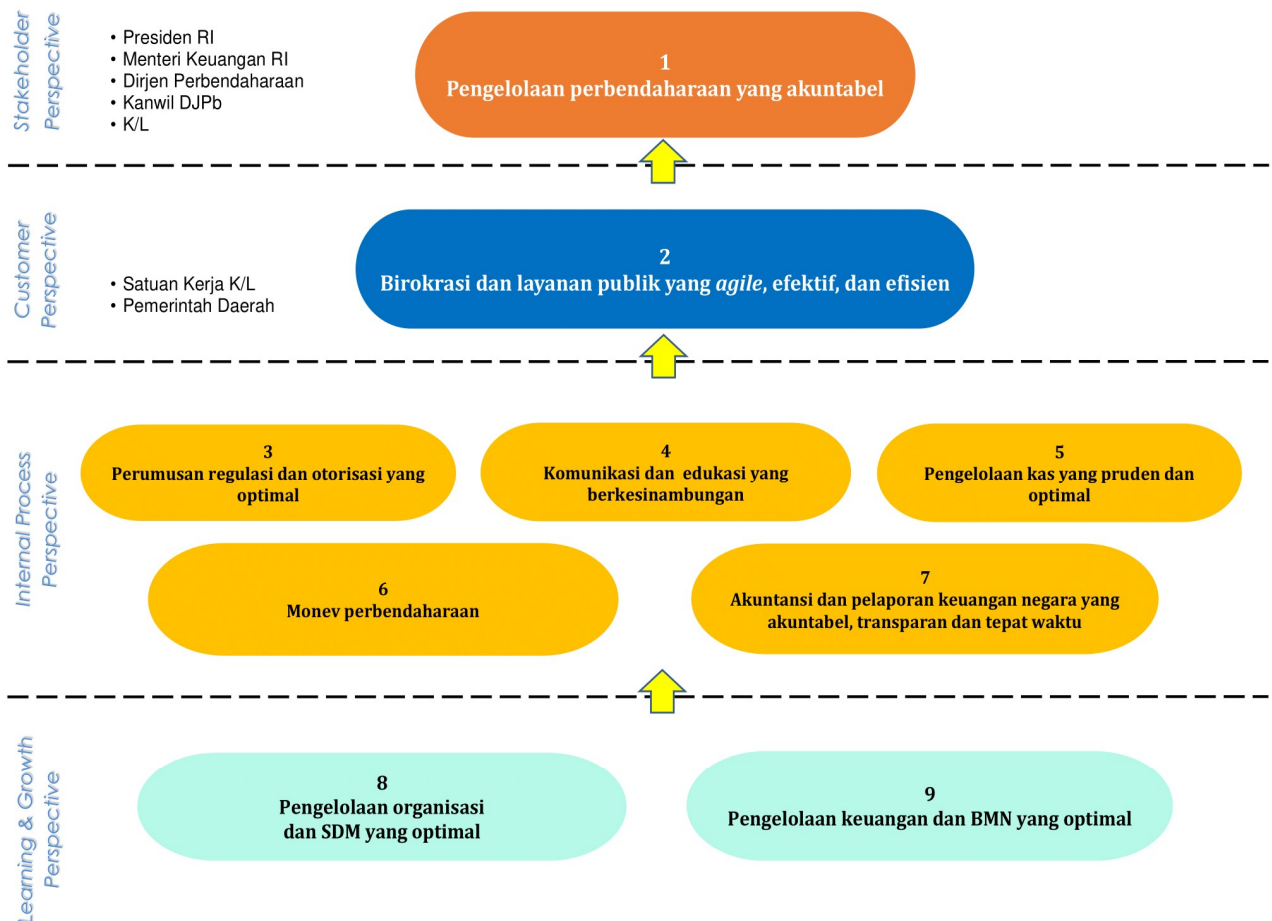
2) Merefleksikan kondisi ideal dan realistis yang ingin dicapai

Pernyataan SS menggambarkan kondisi seharusnya yang ingin dicapai sesuai potensi.

3) Dituliskan dalam bentuk pernyataan kondisional.

Pernyataan SS bersifat kualitatif (bukan kuantitatif).

Gambar 3.1
Peta Strategi KPPN Gorontalo 2020



b. IKU dalam Capaian Sasaran Strategis Beserta Target dan Realisasi

1) Pengelola Perbendaharaan Yang Akuntabel

Pengelolaan perbendaharaan artinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab.

Tabel 3.8
IKU SS Pengelola Perbendaharaan Yang Akuntabel

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88,00	92,59
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94,00	99,68
1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%	99.83%

2) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

Tabel 3.9
IKU SS Birokrasi dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif dan Efisien

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,55	4,56
2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3	3.68

3) Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh Kanwil DJPb dalam rangka pengelolaan perbendaharaan.

Optimal adalah sesuai dengan kebutuhan, implementatif, dan tidak saling bertentangan.

Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan.

Tabel 3.10

IKU SS Perumusan Regulasi dan Otorisasi Yang Optimal

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	99.67%

4) Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan edukasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

Tabel 3.11

IKU SS Komunikasi dan Edukasi Yang Berkesinambungan

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87	91.3%

5) Pengelolaan kas yang pruden dan optimal

Pengelolaan kas yang optimal artinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat memanfaatkan kas yang ada sesuai dengan kebutuhan, memanfaatkan idle cash dengan hasil yang maksimal, meminimalisir cost dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, dimana manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Sedangkan pruden dan optimal dalam pengelolaan kas negara berarti kemampuan dalam mengelola kas negara dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Tabel 3.12

IKU SS Pengelolaan Perbendaharaan Yang Pruden dan Optimal

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	99.82%

6) Monev perbendaharaan

Dalam rangka memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para stakeholder.

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

Tabel 3.13

IKU SS Monev Perbendaharaan

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80	96.53
6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100.00%

7) Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

Tabel 3.14

**IKU SS Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara Yang Akuntabel,
Transparan dan Tepat Waktu**

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1%	99.91%

8) Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mawadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

Tabel 3.15

IKU SS Pengelolaan Organisasi dan SDM Yang Optimal

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77	86,83
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80	99.59
8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	83	90.85
8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74	79.20

9) Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pengelolaan BMN adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Barang Milik Negara yang dimiliki oleh suatu unit.

Optimal adalah pengelolaan keuangan dan BMN dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

Tabel 3.16

IKU SS Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Optimal

Kode IKU	IKU	Target	Realisasi
9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%	97.52
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81	93.30
9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	96.02

6. Penjelasan Capaian IKU

a. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut :

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Variabel: Revisi DIPA (REV), Deviasi Halaman III DIPA (HAL3), Pagu Minus (MIN).
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Variabel: Penyerapan Anggaran (REAL), Penyelesaian Tagihan (TAG), Konfirmasi Capaian Output (KCO), Retur SP2D (RTR).
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, Variabel: Renkas (RPD), Pengembalian/Kesalahan SPM (SPM).

4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi, Variabel: Data Kontrak (KTR), Pengelolaan UP dan TUP (PUP), Rekon LPJ Bendahara (LPJ), Dispensasi Penyampaian SPM (DSPM).

Formula perhitungan IKU ini adalah

Hasil penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN

Metode penilaian IKPA pada Aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut:

$$\text{IKPA} = [5\% (\text{REV}) + 5\% (\text{HAL3}) + 5\% (\text{MIN}) + 15\% (\text{REAL}) + 12\% (\text{TAG}) + 10\% (\text{KCO}) + 5\% (\text{RTR}) + 5\% (\text{RPD}) + 5\% (\text{SPM}) + 15\% (\text{KTR}) + 8\% (\text{PUP}) + 5\% (\text{LPJ}) + 5\% (\text{DSPM})] \times 100$$

Keterangan:

IKPA Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker

REV Indeks kinerja yang dihitung berdasarkan frekuensi Revisi DIPA dalam kewenangan pagu tetap (yang disahkan oleh Kanwil DJPb/Direktorat PA/DJA) yang dibatasi hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan. Indeks kinerja merupakan nilai rata-rata indeks Revisi DIPA dari Satker yang ada di bawah kewenangan Kanwil yang nilai masing-masingnya dihitung dengan menggunakan formula = $(1/\text{Jumlah Revisi DIPA})$, dengan ketentuan: (i) Jumlah Revisi DIPA merupakan jumlah frekuensi revisi DIPA pada periode triwulan bersangkutan; (ii) apabila jumlah revisi DIPA = 0 maka satker diberikan indeks revisi DIPA maksimal atau 1.

HAL3 Indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula = $1 - \text{rata2 per bulan} [(j\text{real}-J\text{renc})/J\text{renc}]$, dengan ketentuan: (i) Jreal merupakan nilai total realisasi anggaran, (ii) Jrenc merupakan jumlah rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, (iii) hasil $[(j\text{real}-J\text{renc})/J\text{renc}]$ maksimal bernilai 1, serta (iv) dalam kondisi hasil $[(j\text{real}-J\text{renc})/J\text{renc}]$ menunjukkan #DIV/0, maka nilainya dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada nilai realisasi; (v) hasil $[(j\text{real}-J\text{renc})/J\text{renc}]$ bernilai absolut (mengabaikan tanda plus atau minus).

Data rencana penarikan dana yang menjadi dasar perhitungan indeks setiap triwulannya adalah data Hal III yang dimutakhirkan melalui revisi administrasi Halaman III DIPA sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 13 Februari, 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Indeks RPD pada Halaman

III DIPA dikunci setiap awal periode triwulanan dan tidak dapat lagi disesuaikan/dimutakhirkan pada periode berikutnya.

- MIN Indeks kinerja terkait pagu minus dihitung berdasarkan persentase besarnya minus belanja dibagi dengan pagu anggaran dengan menggunakan formula = $1 - \frac{\sum \text{Pagu minus}}{\sum \text{Pagu}}$.
- REAL Indeks penyerapan anggaran DIPA K/L, yang dihitung dengan formula = $\frac{\% \text{Real}}{\% \text{Target}}$, dengan ketentuan: (i) %Real merupakan Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L (kumulatif) berupa perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L dengan total pagu, dan (ii) %Target merupakan nilai target % penyerapan DIPA K/L (kumulatif), dengan besaran Q1=15%, Q2=40%, Q3=60%, Q4=90%. Apabila hasil $\frac{\% \text{Real}}{\% \text{Target}}$ lebih besar dari 1 karena $\% \text{Real} > \% \text{Target}$, maka nilai capaian dikonversi menjadi 1.
- TAG Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan, yang dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{Tagihan LS non BP Kontraktual yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Tagihan LS non BP Kontraktual}}$. Dengan ketentuan: Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan pembayarannya paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP).
- KCO Indeks kinerja terkait capaian output dihitung secara bulanan berdasarkan rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola oleh Satker. Output yang terkonfirmasi adalah data output yang dinilai wajar (rasional/tidak bersifat anomali). Ketidakwajaran (anomali) dinilai berdasarkan perbandingan antara realisasi volume keluaran dan progress capaian output yang diisi oleh Satker dengan data lainnya seperti penyerapan anggaran dan rencana (target) output.
- RTR Indeks kinerja terkait level retur SP2D yang dihitung dengan formula = $1 - \frac{(\sum \text{retur SP2D})}{(\sum \text{SP2D terbit})}$
- RPD Indeks kinerja terkait akurasi penyampaian RPD harian satker K/L, yang dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{Renkas Akurat}}{\sum \text{Renkas}}$, dengan ketentuan: (i) $\sum \text{Renkas Akurat}$ merupakan jumlah total data RPD harian yang disampaikan tepat waktu, dan (ii) $\sum \text{Renkas}$ merupakan total data RPD yang disampaikan kepada KPPN.
- SPM Indeks kinerja terkait pengembalian SPM yang diajukan satker, yang dihitung dengan formula = $\frac{\text{JSPM Benar}}{\text{JSPM}}$, dengan ketentuan: (i)

JSPM Benar merupakan Jumlah SPM benar yang diproses menjadi SP2D, dan (ii) JSPM merupakan Jumlah total SPM yang diajukan Satker ke KPPN dan telah diterima oleh Middle Office.

- KTR** Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak, yang dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{Kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Kontrak}}$. Dengan ketentuan, data kontrak dinyatakan disampaikan tepat waktu apabila disampaikan maksimal 5 HK setelah kontrak ditandatangani.
- PUP** Indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dihitung berdasarkan 2 aspek, yaitu: (i) Pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan status yang dapat dipantau pada Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP, dan (ii) Sisa dana UP dan TUP yang belum disetor ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran sebagai penalti nilai. Indeks dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{SPM GUP dan PTUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total SPM GUP dan PTUP pada TW I s/d III}}$, dan dengan formula = $(\frac{\sum \text{SPM GUP dan PTUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total SPM GUP dan PTUP}}) - \text{penalti keterlambatan penyetoran sisa UP di akhir tahun}$. Dengan ketentuan, Pertanggungjawaban UP dinyatakan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu apabila disampaikan tidak lebih dari 1 bulan sejak tanggal SPM UP, SPM TUP, atau tanggal SPM GUP terakhir.
- LPJ** Indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara, yang dihitung dengan formula = $\frac{\sum \text{LPJ yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total LPJ yang harus disampaikan}}$. Dengan ketentuan, Penyampaian LPJ Bendahara dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 10 setelah bulan pelaporan.
- DSPM** Indeks kinerja terkait dispensasi penyampaian SPM, yang dihitung dengan formula = $1 - \frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{SPM yang disampaikan ke KPPN}}$.

Target IKU ini telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat *average* dan triwulanan, sehingga realisasi tahun 2020 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

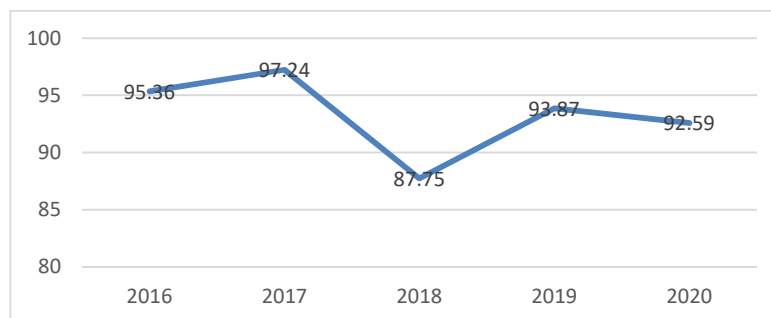
Tabel 3.17
Penjelasan Capaian IKU IKPA

Keterangan	Bobot (%)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Nilai	Nilai Akhir	Nilai	Nilai Akhir	Nilai	Nilai Akhir	Nilai	Nilai Akhir
REV	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
HAL3	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MIN	5	N/A	N/A	N/A	N/A	99.37	4.97	99.2	4.96
REAL	15	N/A	N/A	N/A	N/A	100	15	100	15
TAG	12	N/A	N/A	N/A	N/A	97.84	11.74	97.86	11.74
KCO	10	N/A	N/A	N/A	N/A	92.38	9.24	94.43	9.79
RTR	5	N/A	N/A	N/A	N/A	99.71	4.9	99.73	4.99
RPD	5	N/A	N/A	N/A	N/A	98.57	4.93	100	5
SPM	5	N/A	N/A	N/A	N/A	80	4	85	4.25
KTR	15	N/A	N/A	N/A	N/A	72.07	10.81	84.39	12.66
PUP	8	N/A	N/A	N/A	N/A	94.85	7.59	92.95	7.44
LPJ	5	N/A	N/A	N/A	N/A	81.76	4.09	76.53	3.83
DSPM	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	5	100	5
Nilai Total		N/A		N/A		82.53		84.31	
Konversi Bobot		N/A		N/A		90		90%	
Nilai Akhir		N/A		N/A		91.5		93.67	

Capaian IKU ini merupakan hasil penilaian IKPA pada menu Monev PA Sub menu Capaian IKU IKPA (BETA) di aplikasi OMSPAN.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2016 sebesar 95.36%, tahun 2017 sebesar 97.24%, 2018 sebesar 87.75%, pada tahun 2019 sebesar 93.87, dan pada tahun 2020 sebesar 92.59%

Grafik 3.2
Capaian IKU IKPA 2016-2020



Tabel 3.18
Perbandingan Target dan Realisasi IKU IKPA

IKU	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	70	95.36	75	97.24	75	87.75	80	93.87	88	92.59

Tujuan IKU:

Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L.

Isu Utama:

Kualitas kinerja satker yang dinilai dari aspek perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dengan variabel retur SP2D, aspek efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi perlu dijaga konsistensinya. IKPA K/L merupakan salah satu komponen dalam kinerja KPPN yang dapat mempengaruhi persepsi stakeholders dalam melakukan penilaian atas kinerja KPPN secara keseluruhan

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan reviu pelaksanaan anggaran setiap bulan
- Mengadakan sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2020 diawal tahun
- Sebagai pengganti Monev IKPA akan dibuat reminder bagi satker yang belum memaksimalkan IKPA
- Membentuk task force untuk mengawal kinerja pelaksanaan anggaran satker
- Remider satker pada saat batas-batas akhir pengajuan SPM

Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengoptimalkan penggunaan Sosial Media KPPN Gorontalo dengan menyajikan informasi dan tutorial bagi satker

b. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas

Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya.

Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kanwil DJPb dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) DJPb.

Dasar pelaksanaan mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN tingkat KPPN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Tingkat kantor Wilayah yang tertuang dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa analisis bertujuan untuk memberikan penilaian obyektif terhadap penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pada UAKBUN-Daerah dan UAKKBUN-Kanwil.

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut :

Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 80-94 (Baik)

Level 2 = 65-79 (Cukup)

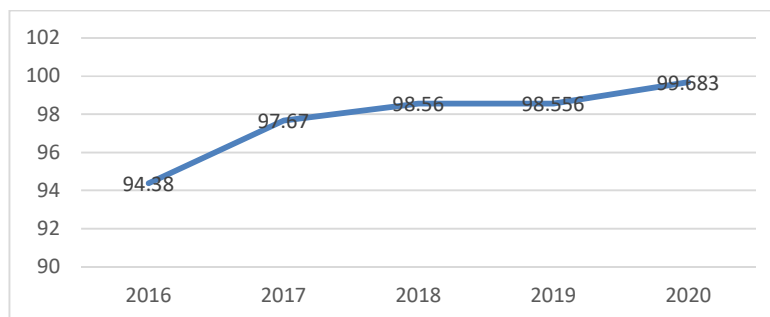
Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2020, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2019.

Untuk capaian IKU ini pada tahun 2016 adalah 94.38, pada tahun 2017 sebesar 97.67, 2018 adalah 98.56, pada tahun 2019 sebesar 98.556, nilai 2020 atas penilaian LK Kuasa Bun pada tahun 2019 yaitu 99,683.

Grafik 3.3

Capaian IKU LK UAKPA 2016-2020



Tabel 3.19
Perbandingan Target dan Realisasi IKU LK UAKPA

IKU	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	92	94.38	93	97.67	94	98.56	95	98.556	94	99.683

Tujuan IKU:

Mewujudkan peningkatan kualitas penyusunan LK Kuasa BUN KPPN

Isu Utama:

Nilai LK Kuasa BUN KPPN dipengaruhi oleh validitas data transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Pelaksanaan rekonsiliasi internal harian.
- Monitoring data suspend atas penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN, dan menghubungi satker untuk melakukan perbaikan/koreksi penerimaan jika terdapat transaksi suspend
- Pelaksanaan analisis Neraca Percobaan dan Neraca lajur detil segmen satker. Memastikan tidak terdapat penggunaan akun/CoA yang salah pada transaksi di satker.
- Membuat Nota Dinas ke Seksi terkait, jika di temukan kesalahan penggunaan akun/CoA

Rekomendasi Rencana Aksi

- Pelaksanaan rekonsiliasi internal
- Monitoring data suspend atas penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN.
- Pelaksanaan analisis Neraca Percobaan dan Neraca lajur detil segmen satker
- Membuat Nota Dinas ke Seksi terkait, jika di temukan kesalahan penggunaan akun/CoA.

c. Presentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN adan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila realisasi deviasi Rencana Penarikan Dana satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD

satker.

PPDH adalah Perkiraan Pencairan Dana Harian, yang menjadi pagu pencairan tertinggi KPPN dalam satu hari.

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Formula IKU ini pada triwulan I dan II Tahun 2020 yaitu $100\% - (\text{Rata-rata deviasi RPD harian KPPN Per periode})$, sedangkan pada triwulan III dan IV Tahun 2020 yaitu $100\% - (80\% \text{ Rata-rata deviasi RPD harian KPPN per periode} + 20\% \text{ Rata-Rata Deviasi PPDH Harian KPPN Per Periode})$

Tabel 3.20

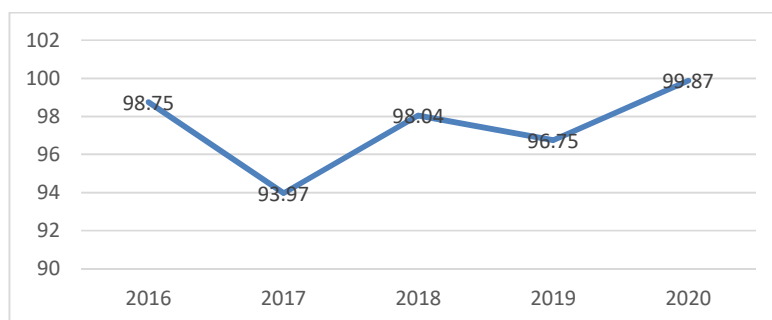
Penjelasan Capaian IKU IKPA

Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
Jan	Dev. RPD	N/A	Apr	Dev. RPD	0.89	Jul	Dev. RPD	0	Okt	Dev. RPD	0
							Dev. PPDH			Dev. PPDH	
Feb	Dev. RPD	N/A	Mei	Dev. RPD	0.19	Agt	Dev. RPD	0	Nov	Dev. RPD	0
							Dev. PPDH			Dev. PPDH	
Mar	Dev. RPD	N/A	Jun	Dev. RPD	0.47	Sep	Dev. RPD	0	Des	Dev. RPD	0
							Dev. PPDH			Dev. PPDH	
Akurasi		N/A	Akurasi		99.48	Akurasi		100	Akurasi		100

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2016 sebesar 98.75%, tahun 2017 sebesar 93.97%, 2018 sebesar 98.04%, pada tahun 2019 sebesar 96.75%, dan pada tahun 2020 sebesar 99.87%.

Grafik 3.4

Capaian IKU Akurasi PPDH 2016-2020



Tabel 3.21

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Akurasi PPDH

IKU	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	85	98.75	85	93.97	85	98.04	85	96.75	80	99.87

Tujuan IKU

Untuk mengukur tingkat akurasi perencanaan kas harian tingkat KPPN

Isu Utama

Ketepatan penyampaian RPD oleh satker wujud garansi kualitas perencanaan satuan kerja. Sesuai ketentuan baru tentang RPD (PMK 197/PMK.05/2017) penyampaian/pelaksanaan RPD telah banyak diberikan kemudahan-kemudahan bagi satker, antara lain penyampaian SPM tanpa RPD namun dilengkapi adanya Surat Pernyataan KPA ttg penundaan pencairan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan RPD, baik di satker maupun KPPN.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan

- Sosialisasi tentang ketentuan baru RPD (PMK 197/PMK.05/2017)

- Sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2020, salah satu materinya terkait perencanaan kas
- Sosialisasi dan bimtek secara intensif
- Kegiatan pendampingan khususnya terhadap satker dengan pagu besar
- Menyampaikan teguran kepada satker yang tidak memenuhi RPD sesuai yang telah disampaikan

Rekomendasi Rencana Aksi

- Membuat model statistik untuk peramalan realisasi belanja harian, khususnya untuk periode akhir tahun anggaran

d. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana .

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :

5 = Sangat Puas

4 = Puas

3 = Cukup Puas

2 = Kurang Puas

1 = Tidak Puas

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan.

Adapun capaian indeks kepuasan layanan KPPN merupakan rata-rata atas indeks kepuasan pada 5 (lima) kinerja layanan di KPPN, yaitu:

Tabel 3.22

Penjelasan Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN

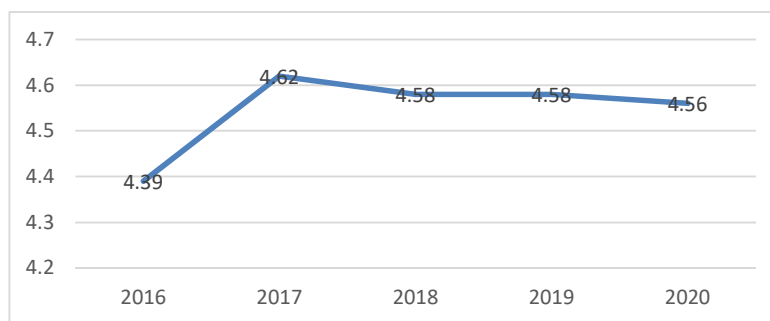
1. Layanan Kinerja Pencairan Dana	4,53
2. Layanan Kinerja Bimbingan dan Konsultasi	4,57
3. Layanan Kinerja Konfirmasi Surat Setoran	4,53

4. Layanan Kinerja Rekonsiliasi	4,59
5. Layanan Kinerja Sarana dan Prasarana	4,57
Rata-rata / indeks kepuasan layanan KPPN	4,56

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara capaian IKU ini pada tahun 2016 sebesar 4.39, tahun 2017 sebesar 4.62, 2018 sebesar 4,58; pada tahun 2019 4,58; serta di tahun 2020 sebesar 4.56.

Grafik 3.5

Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2016-2020



Tabel 3.23

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN

IKU	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.07	4.39	4.08	4.62	4.09	4.58	4.10	4.58	4.55	4.56

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN kepada mitra kerja.

Isu Utama:

Tingkat kepuasan satker terhadap layanan KPPN ditentukan oleh tingkat persepsi satker dan stakeholders dalam menerima layanan melalui pengisian survey kepuasan yang diberikan sangat bersifat subyektif dan dengan tingkat harapan yang semakin tinggi.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan analisa atas hasil survey untuk memetakan kelemahan pelayanan dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan pada masing-masing unit.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil survei periode sebelumnya.
- Melaksanakan/melengkapi sarana dan informasi sebagai tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang
- Melakukan tindakan perbaikan atas hasil survei periode sebelumnya yang masih kurang.
- Meminta konfirmasi/masukan dari satker atas hal-hal masih kurang dalam layanan sesuai hasil survey sebelumnya.
- Melakukan peningkatan layanan dengan memeriksa seluruh adk rekon yang sudah diupload di jam kerja.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan Sosialisasi inovasi-inovasi pelayanan yang diberikan KPPN dalam bentuk Aplikasi

e. Indeks Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas

Efektivitas pengeluaran kas KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder .

IKU ini memiliki formula (70% nilai indeks A) + (30% Nilai Indeks B)

Dimana Indeks A

$$\frac{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh BO}}{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Dan Indeks B

$$\frac{\{[n \text{ SP2D} - P \text{ I1} * 1] + [n \text{ SP2D} - P \text{ I2} * 2] + [n \text{ SP2D} - P \text{ I3} * 3] + [n \text{ SP2D} - P \text{ I4} * 4]\}}{\sum n \text{ SP2D} - P}$$

IKU ini ditetapkan dengan target 3 dari skala 4 dan penilaian dilakukan setiap triwulan.

Tabel 3.24

Penjelasan Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Penyaluran SP2D Yang Akurat	N/A	4	4	4
SP2D yang diterbitkan	N/A	122	119606	127589
SP2D yang Diretur	N/A	37	78	63
Kecepatan Penyelesaian Retur	N/A	2.62	2.68	3.49
SP2D pengganti sesuai indeks 1	N/A	10	1	3
SP2D pengganti sesuai indeks 2	N/A	7	42	2
SP2D pengganti sesuai indeks 3	N/A	7	16	19
SP2D pengganti sesuai indeks 4	N/A	13	19	39
Total SP2D pengganti	N/A	37	78	63
Konversi Indeks A (70%)	N/A	2.8	2.8	2.8
Konversi Indeks B (30%)	N/A	0.79	1.2	1.05
Nilai Konversi	N/A	3.59	3.6	3.85

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2020, pada tahun 2020 sendiri capaiannya adalah 3.68.

Tujuan IKU

Meningkatkan efektifitas pengelolaan pengeluaran kas melalui akurasi penyaluran dana SP2D dan penyelesaian retur SP2D

Isu Utama

Masih banyaknya retur yang terjadi pada SPM yang diajukan satker.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan

Mengirim surat pemberitahuan retur secara tepat waktu dan berkoordinasi dengan satker untuk mempercepat penyelesaian retur

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan sosialisasi tentang alur retur SP2D kepada satker sebagai langkah preventif untuk tahun selanjutnya.

f. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Front Office Seksi Pencairan SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- Data supplier, KONtrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- Tidak dalam keadaan force majeure

Formula perhitungan capaian IKU ini adalah

$$\frac{\sum \text{SP2D yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}}{\sum \text{SPM} - \sum \text{Penolakan SPM secara Formal}} \times 100\%$$

Ket: Penolakan SPM secara formal terdapat pada menu rekap penolakan PMRT di Aplikasi Om SPAN

Pada triwulan II terdapat perubahan formula perhitungan capaian IKU, menjadi

$$\frac{\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}}{\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}} \times 100\%$$

Ket : Kriteria SP2D sebagaimana prasyarat kondisi yang disebutkan di Definisi.

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2020 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.25

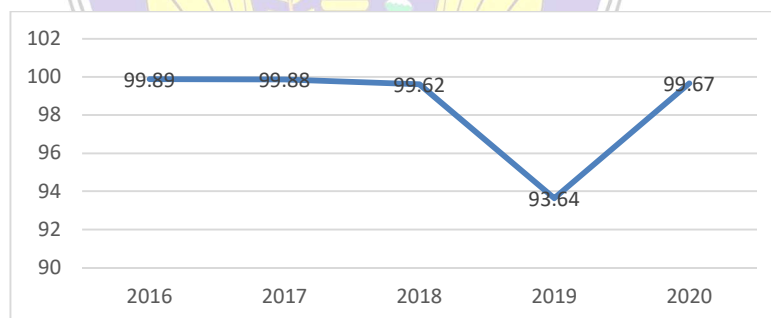
Penjelasan Capaian IKU Penyelesaian SP2D Tepat Waktu

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
ΣSP2D sesuai kriteria yang Diterbitkan tepat waktu oleh KPPN	N/A	101	1602	788
ΣSP2D sesuai kriteria yang Diterbitkan oleh KPPN	N/A	102	1602	788
Persentase	N/A	99.01%	100%	100%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2016 sebesar 99.89%, 2017 sebesar 99.88%, 2018 sebesar 99,62%, pada 2019 sebesar 93.64%, dan pada tahun 2020 sebesar 99.67%.

Grafik 3.6

Capaian IKU Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN 2016-2020



Tabel 3.26

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Penyelesaian SP2D Tepat Waktu

IKU	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	98%	99.89%	98%	99.88%	98%	99,62%	98%	93.64%	99.4%	99.67 %

Tujuan IKU:

Mengukur tingkat penyelesaian SPM yang diajukan oleh Satker.

Isu Utama:

Capaian IKU Presentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu telah mencapai target yang ditentukan, namun demikian masih perlu dicermati ketika jumlah spm yang disampaikan overload.

Implikasi:

Apabila SPM yang masuk dalam jumlah banyak target IKU belum tentu akan tercapai

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Membangun komunikasi antar petugas terkait
- Pengumuman PPR di grup whatsapp kantor
- Mengatur tahapan proses validasi SPM untuk memberikan waktu dalam proses penyelesaian SPM

Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan proses penyelesaian SP2D 1 jam untuk perbaikan ke depan.

g. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Formula IKU:

Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi

$0 < x \leq 20$	= tidak efektif
$20 < x \leq 40$	= kurang efektif
$40 < x \leq 60$	= cukup efektif
$60 < x \leq 80$	= efektif
$80 < x \leq 100$	= sangat efektif

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2020 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama dua semester.

Tabel 3.27

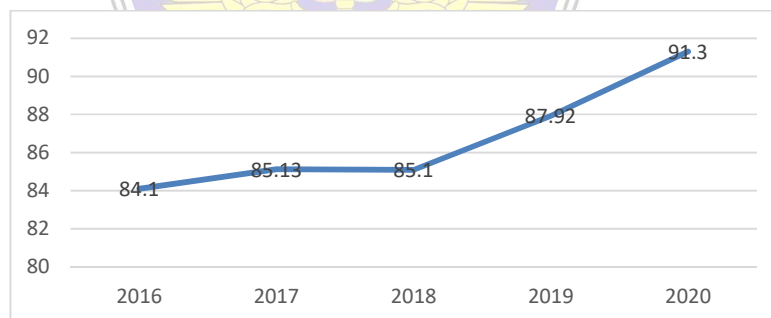
Penjelasan Capaian IKU Edukasi dan Komunikasi

	Nilai Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
Semester I	87.6
Semester II	95

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2016 sebesar 84.10, 2017 sebesar 85.13, pada tahun 2018 sebesar 85.10; pada tahun 2019 sebesar 87.92; dan di tahun 2020 sebesar 91.3.

Grafik 3.7

Capaian IKU Edukasi dan Komunikasi 2016-2020



Tabel 3.28

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Edukasi dan Komunikasi

IKU	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	75	84.10	75	85.13	80	85.10	80	87.92	87	91.3

Tujuan IKU:

Untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan.

Isu Utama:

Dalam pelaksanaan bimtek dan sosialisasi sebagai salah satu bentuk edukasi dan komunikasi diukur melalui pengisian kuesioner atau pelaksanaan pretest dan post test. Hal tersebut menggambarkan efektif atau tidaknya edukasi dan komunikasi yang telah dilakukan. Narasumber yang ditunjuk tidak sepenuhnya didasarkan pertimbangan kemampuan dalam berkomunikasi pada saat menyampaikan materi yang dapat menjamin efektivitas edukasi dan komunikasi, namun lebih didasarkan pada tupoksi yang melekat pada narasumber.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan penyamaan persepsi atas bahan-bahan/materi yang akan disampaikan sebelum dilakukan sosialisasi atau bimtek melalui GKM/diskusi narasumber
- Memberikan diklat kepada pegawai terkait dengan pengembangan komunikasi melalui media online
- Memberikan jam terbang kepada pegawai untuk menyampaikan materi-materi GKM
- Melakukan GKM yang narasumbernya dari setiap pegawai secara bergantian

Rekomendasi Rencana Aksi

- Pelatihan/GKM terkait komunikasi yang efektif kepada semua pegawai.

h. Persentase LPJ Bendahara yang Andal dan Tepat Waktu

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018.

Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan

Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2020 merupakan rata-rata data bulan Desember 2019, bulan Januari dan Februari tahun 2020. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2020 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun 2020. dst.

Formula IKU

$$\frac{\sum \text{LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100 \%$$

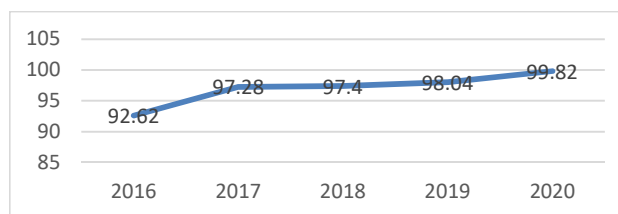
Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2020 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.29
Penjelasan Capaian IKU LPJ

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Σ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	827	813	813	819
Σ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN	830	813	813	822
Persentase	99.64%	100%	100%	99.64%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2016 sebesar 92.62%, 2017 sebesar 97.28%, 2018 sebesar 97,4; pada tahun 2019 sebesar 98.04 dan di tahun 2020 sebesar 99.82%.

Grafik 3.8
Capaian IKU LPJ Bendahara 2016-2020



Tabel 3.30
Perbandingan Target dan Realisasi LPJ Bendahara

IKU	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	95	92.62	95	97.28	95	97.4	95	98.04	98	99.82

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas dan tingkat kepatuhan Bendahara Satker dalam menyusun dan menyampaikan LPJ Bendahara.

Isu Utama:

Masih ada beberapa satker yang terlambat menyampaikan LPJ Bendahara.

Implikasi:

Berpengaruh kepada capaian IKU.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat menyampaikan LPJ ke KPPN.
- Mengingatkan kepada satker melalui surat dan telegram mengenai penegasan kewajiban satker dalam penyampaian LPJ Bendahara

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring dan evaluasi kepada satker besar, untuk selama masa pandemi akan dilakukan dengan bersurat

i. Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa.

Nilai Kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI).
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

Formula IKU ini adalah

$$\text{NKP DDD} = [0,15 (\text{SYARAT}) + (0,20 (\text{PROYEKSI}) + 0,30 (\text{SPPSPM}) + 0,15 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA})] \times 100$$

Keterangan:

- NKP DFDD adalah rata-rata Nilai Kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa.
- SYARAT adalah rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengunggahan/upload melalui aplikasi omSPAN) dokumen persyaratan penyaluran DDD oleh pemda per jenis transfer per bidang/sub bidang per tahap penyaluran dengan mengacu pada ketentuan batas akhir yang disampaikan/dijelaskan/ditetapkan oleh Kantor Pusat mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait maupun Nota Dinas atau Surat resmi dari pejabat Menteri Keuangan/Eselon I/II Kantor Pusat.

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DDD per jenis transfer per bidang per tahap penyaluran (NIKWPDP DDD) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1,00 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 3 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 2 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 1 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,85 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 1 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,80 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap tepat pada batas waktu yang ditentukan dokumen persyaratan disampaikan.

0,75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)

SYARAT = Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian = $\sum \text{NIKWPDP DDD} / \text{Jumlah penyaluran DFDD per jenis transfer per bidang per tahap penyaluran yang dilakukan}$.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait.

- Proyeksi adalah 'KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan Penyaluran DAK dan Dana Desa serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa adalah setiap 7 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

PROYEKSI = % Akurasi Proyeksi = $100\% - (\text{Rata2 Deviasi Proyeksi Penyaluran DDD per periode})$ Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

$$\text{Deviasi} = \left[\frac{\text{RPD Bulanan} - \text{Realisasi Penyaluran}}{\text{RPD Bulanan}} \right] \times 100\%$$

Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut:

- 1,00 = deviasi per periode 0%;
- 0,80 = deviasi per periode 1 % sd 15%
- 0,00 = deviasi per periode di atas 15%.

- SSPSPM adalah indeks ketepatan waktu penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran diukur dengan menggunakan 2 variabel, yaitu penyelesaian tagihan dan penyelesaian retur SP2D penyaluran dengan mengacu pada ketentuan serta kriteria sebagai berikut:
- a. penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran dilakukan paling lambat 7 HK setelah dokumen persyaratan telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.
 - b. Ketepatan waktu penyelesaian retur SP2D Penyaluran DAK dan Dana Desa berdasarkan PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

$$SPPSPM = (\text{Jumlah tagihan DAKDD yang diselesaikan proses pembayarannya tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tagihan DAKDD yang diproses KPPN} \times 0.8) + (\text{Jumlah penyelesaian retur SP2D Penyaluran DAKDD yang diproses secara tepat waktu} / \text{jumlah seluruh retur SP2D DAKDD} \times 0.2) ..$$

- MONEV adalah nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Koordinator KPA penyaluran sesuai ketentuan pelaksanaan monev DAK dan Dana Desa. Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran disampaikan kepada Kanwil dengan tembusan kepada Koordinator KPA melalui alamat email subditpa4@gmail.com paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir.

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAKDD oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1,00 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,95 = dokumen laporan monev disampaikan 3-2 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,85 = dokumen laporan monev disampaikan 1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,80 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

0,65 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.

➤ LK-UAKPA adalah indeks ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DFDD sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah sebagai berikut:

a. LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya.

b. LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA berjalan.

c. LK Tahunan disampaikan paling lambat 5 Februari TA berikutnya.

d. LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April TA berikutnya.

LK-UAKPA = prosentase ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN = $\frac{\sum \text{Laporan yang disampaikan tepat waktu pada Triwulan berkenaan}}{\sum \text{Laporan yang harus disampaikan pada Triwulan berkenaan}}$

LK tingkat UAKPA BUN kepada UAKKPA disampaikan melalui ftp://172.16.2.124/ sesuai batas waktu yang ditentukan di atas (dapat ditentukan lain oleh surat Dirjen Perbendaharaan/Direktur APK)

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).

Penentuan Nilai Indeks ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN kepada UKKPA BUN dihitung dengan ketentuan sbb:

1,00 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,90 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan 3-1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan.

0,80 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan.

0,50 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan terlambat sd 2 minggu dari batas waktu yang ditentukan.

0,25 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan terlambat diatas 2 minggu dari batas waktu yang ditentukan.

0,00 = dokumen LK tingkat UAKPA BUN disampaikan di atas 1 bulan atau tidak disampaikan

Dalam kondisi tertentu, batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

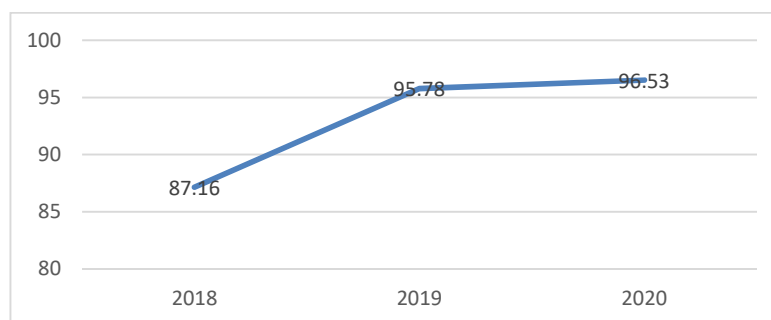
Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2020 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

Tabel 3.31
Penjelasan Capaian IKU DAK dan Dana Desa

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
SYARAT	10	14.69	N/A	N/A
PROYEKSI	18	17.53	19.87	20
SSPSPM	30	30	29.17	30
MONEV	20	15	15	9.75
LK-UAKPA	20	20	19.33	19.33
NKP DFDD	97.78	97.22	98.09	93.04

Capaian IKU ini baru ada pada tahun 2018 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2018 sebesar 87,16; pada tahun 2019 sebesar 95.78; dan di tahun 2020 sebesar 96.53.

Grafik 3.9
Capaian IKU DAK dan Dana Desa KPPN 2016-2020



Tujuan IKU:

Untuk mengetahui kinerja Pemda, serta KPA penyaluran DAK dan Dana Desa dalam kegiatan pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Isu Utama:

Terdapat retur pada dana bos (dak non fisik) karena kesalahan rekening dari dinas serta Masih ada kontrak yang berjalan sehingga belum bisa dilakukan proses penginputan SP2D bud dak fisik oleh dinas/opd

Implikasi:

Masih ada dana bos yang belum tersalur ke rekening sekolah serta lambatnya proses penginputan SP2D bud untuk mengetahui realisasi dan sebagai syarat penyaluran dak fisik tahun berikutnya

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dit SITP untuk penyelesaian retur BOS
- Berkoordinasi dengan pemda dan dinas untuk penginputan SP2D BUD.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Menunggu perbaikan data supplier dari Dit SITP Menghubungi Pemda yang belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara intens sebelum batas akhir penyaluran tiap tahapannya.
- Mempush pemda dan opd untuk selalu mengupdate kontrak yang sudah selesai

j. Presentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI

IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2020 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI.

Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2020, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut :

A. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2020 secara tepat waktu (sesuai target dalam Tabel A), dan;

B. Pencapaian atas jumlah satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2020 secara nasional (sesuai target dalam Tabel B).

Tabel A. Tahapan Kegiatan Implementasi SAKTI Tahun 2020

Periode	Tahapan	Tahapan Kegiatan	Target Waktu Pelaksanaan	Porsi
Semester I	Tahap 1	Pendampingan Transaksi awal tahun 2020 (SAKTI desktop)	Triwulan I	N/A%
	Tahap 2	Pendaftaran email kedinasan domain @sakti.mail.go.id (Tahap I)	Triwulan I	6%
	Tahap 3	Set up konfigurasi satker dan pendaftaran user SAKTI (Tahap I)	Triwulan I	6%
	Tahap 4	Refreshment training SAKTI tahun 2020 (SAKTI Web dan Desktop)	Triwulan I	8%
	Tahap 5	Pendampingan Migrasi Saldo awal SAKTI tahun 2020 berdasarkan LKKL Unaudited (SAKTI Desktop) pada 5 K/L yang ditunjuk.	Triwulan I	N/A
	Tahap 6	Pendampingan penyusunan RKAKL/DIPA 2021	Triwulan II	11%
	Tahap 7	Pendampingan pelaksanaan Revisi DIPA 2020	Triwulan II	10%
	Tahap 8	FGD/Sosialisasi Tahap I implementasi SAKTI Modul Pelaksanaan dan Pelaporan (SAKTI Web)	Triwulan II	5%
	Tahap 9	Publikasi Tahap I implementasi SAKTI Modul Pelaksanaan dan Pelaporan (SAKTI Web)	Triwulan II	4%
Semester II	Tahap 10	FGD/Sosialisasi Tahap II implementasi SAKTI Modul Pelaksanaan dan Pelaporan (SAKTI Web)	Triwulan III	5%
	Tahap 11	Pelaksanaan Training Tahap I SAKTI Modul Pelaksanaan dan Pelaporan (SAKTI Web)	Triwulan III	5%
	Tahap 12	Pelaksanaan Training Tahap II SAKTI Modul Pelaksanaan dan Pelaporan (SAKTI Web)	Triwulan IV	5%
	Tahap 13	Publikasi Tahap II implementasi SAKTI Modul Pelaksanaan dan Pelaporan (SAKTI Web)	Triwulan IV	4%
	Tahap 14	Pendaftaran email kedinasan domain @sakti.mail.go.id (Tahap II)	Triwulan IV	3%
	Tahap 15	Set up konfigurasi satker dan pendaftaran user SAKTI (Tahap II) untuk satker KL yang ditentukan	Triwulan IV	3%
	Tahap 16	Pendampingan implementasi SAKTI	Triwulan IV	25%

Tabel B. Jumlah Satker Kementerian Lembaga yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2020

No.	Satker	Keterangan
-----	--------	------------

1	Satker pusat Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan PMK Implementasi SAKTI tahun 2020 (di luar satker lingkup Kemenkeu, PPATK, Kemensetneg, KPK, Kemenpan RB, Bappenas, dan LKPP)	Untuk implementasi SAKTI berbasis web Modul Admin dan Modul Penganggaran
2	Satker pusat Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan PMK Implementasi SAKTI tahun 2020 (satker lingkup Kemenkeu, PPATK, Kemensetneg, KPK, Kemenpan RB, Bappenas, dan LKPP)	Untuk implementasi seluruh modul SAKTI desktop

Dan kemudian dilakukan perubahan pada triwulan III

Periode	Tahapan	Tahapan Kegiatan	Target Waktu Pelaksanaan	Porsi
Semester I	Tahap 1	Pendampingan Transaksi awal tahun 2020 (SAKTI desktop)	Triwulan I	NA
	Tahap 2	Pendaftaran email kedinasan domain @sakti.mail.go.id (Tahap I)	Triwulan I	6%
	Tahap 3	Set up konfigurasi satker dan pendaftaran user SAKTI (Tahap I)	Triwulan I	6%
	Tahap 4	<i>Refreshment training</i> SAKTI tahun 2020 (SAKTI Web dan Desktop)	Triwulan I - II	8%
	Tahap 5	Pendampingan Migrasi Saldo awal SAKTI tahun 2020 berdasarkan LKKL Unaudited dan Audited (SAKTI Desktop) pada 5 K/L yang ditunjuk.	Triwulan II	NA
	Tahap 6	Pendampingan pelaksanaan Revisi DIPA 2020	Triwulan II - IV	30%
	Tahap 7	Publikasi Tahap I implementasi SAKTI Web	Triwulan II	4%
Semester II	Tahap 8	FGD/Sosialisasi Tahap I implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan)	Triwulan III	4%
	Tahap 9	Pelaksanaan Training Tahap I SAKTI Web Modul Penganggaran Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) kepada seluruh Satker KL	Triwulan III	5%
	Tahap 10	Pendampingan penyusunan RKAKL TA 2021 (RSPP)	Triwulan III	10%
	Tahap 11	Pendampingan Implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan)	Triwulan IV	10%
	Tahap 12	Pendampingan penyusunan DIPA TA 2021 (RSPP)	Triwulan IV	10%
	Tahap 13	Publikasi Tahap II implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan) kepada satker di luar peserta Piloting SAKTI Tahap I sd V	Triwulan IV	7%

Formula IKU:

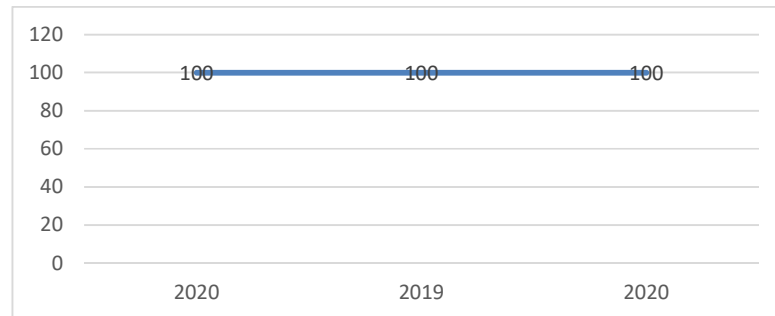
$$\frac{\text{Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2020}}{\text{Total jumlah satker yang ditetapkan mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2020}} \times 100\% \times \text{Proporsi Tahapan}$$

Tabel 3.32
Penjelasan Capaian SAKTI

Periode	Tahapan	Tahapan Kegiatan	Target	Capaian
Semester I	Tahap 1	Pendampingan Transaksi awal tahun 2020 (SAKTI desktop)	NA	NA
	Tahap 2	Pendaftaran email kedinasan domain @sakti.mail.go.id (Tahap I)	6%	6%
	Tahap 3	Set up konfigurasi satker dan pendaftaran user SAKTI (Tahap I)	6%	6%
	Tahap 4	<i>Refreshment training</i> SAKTI tahun 2020 (SAKTI Web dan Desktop)	8%	8%
	Tahap 5	Pendampingan Migrasi Saldo awal SAKTI tahun 2020 berdasarkan LKKL Unaudited dan Audited (SAKTI Desktop) pada 5 K/L yang ditunjuk.	NA	NA
	Tahap 6	Pendampingan pelaksanaan Revisi DIPA 2020	30%	30%
	Tahap 7	Publikasi Tahap I implementasi SAKTI Web	4%	4%
Semester II	Tahap 8	FGD/Sosialisasi Tahap I implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan)	4%	4%
	Tahap 9	Pelaksanaan Training Tahap I SAKTI Web Modul Penganggaran Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) kepada seluruh Satker KL	5%	5%
	Tahap 10	Pendampingan penyusunan RKAKL TA 2021 (RSPP)	10%	10%
	Tahap 11	Pendampingan Implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan)	10%	10%
	Tahap 12	Pendampingan penyusunan DIPA TA 2021 (RSPP)	10%	10%
	Tahap 13	Publikasi Tahap II implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan) kepada satker di luar peserta Piloting SAKTI Tahap I sd V	7%	7%

Capaian IKU ini baru ada pada tahun 2018 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar 100,00%.

Grafik 3.10
Capaian IKU SAKTI 2016-2020



Tujuan IKU:

Mengetahui tingkat keberhasilan implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2020 pada seluruh satker Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam PMK Implementasi SAKTI Tahun 2020.

Isu Utama:

Implementasi SAKTI merupakan salah satu upaya dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satker. Piloting implementasi SAKTI tahap V telah tertuang dalam KMK No 537/KMK.05/2020 sehingga harus dipastikan dapat berjalan sesuai tahapan/rencana.

Implikasi:

Dalam tahap-tahap selanjutnya harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai tahapan yang telah direncanakan

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan EUT SAKTI untuk semua Modul SAKTI kepada satker Piloting
- Melaksanakan publikasi SAKTI kepada seluruh satker
- Melakukan sosialisasi Tahap I mengenai Review SAKTI kepada seluruh satker sebagai salah satu bagian dalam Bimtek Aplikasi kepada satker
- Training modul admin dan penganggaran SAKTI berbasis web

- Melakukan publikasi dan komunikasi SAKTI tahap III untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK

Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan persiapan pelaksanaan pemdampingan SAKTI tahap berikutnya ke seluruh satker
- Memberikan kesempatan bagi seluruh satker user SAKTI untuk mengikuti End User Training (EUT) SAKTI secara langsung dengan KPPN Gorontalo

k. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan.

Selanjutnya, sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4841/PB/2016 tanggal 14 Juni 2016 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN Bulan Januari s.d. Mei 2016, Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak lagi melakukan rekonsiliasi antara UAPPA-W, namun diwajibkan untuk memantau pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA pada seluruh KPPN di wilayah kerjanya.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan:

- (1) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%)
- (2) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan.

Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki Transaksi Dalam Konfirmasi/TDK (Suspen) Belanja (ambang batas 0%) dan TDK Kas di Bendahara Pengeluaran (ambang batas 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan 1 2020 = Desember 2019 - Februari 2020

Triwulan 2 2020 = Maret - Mei 2020

Triwulan 3 2020 = Juni - Agustus 2020

Triwulan 4 2020 = September - November 2020

Formula perhitungan capaian IKU sebagai berikut

$$\text{Capaian IKU} = 50\% \left(\frac{a}{c} \right) + 50\% \left(\frac{b}{c} \right)$$

Keterangan : a= Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu

b= Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen dan status BAR sudah ditandatangani oleh KPA dan Kepala Seksi Vera

c= Jumlah satker aktif pada periode berkenaan

Target IKU ini telah ditetapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average, sehingga realisasi tahun 2020 merupakan hasil pembagian secara merata atas realisasi selama empat triwulan. Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

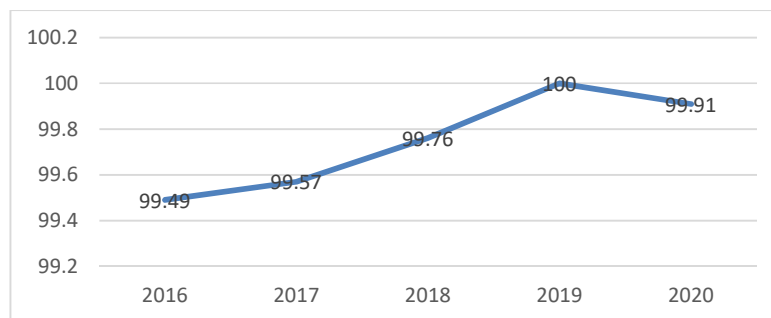
Tabel 3.32

Penjelasan Capaian IKU Rekonsiliasi Tingkat UAKPA

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu	245	N/A	679	678
Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen	-	N/A	1	3
Jumlah satker aktif pada periode berkenaan	245	N/A	680	681
Persentase	100	N/A	99.85	99.78%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian IKU ini pada tahun 2016 sebesar 99.49%, 2017 sebesar 99.57%, 2018 sebesar 99,76%, 2019 100% dan 2020 sebesar 99.91%.

Grafik 3.11
Capaian IKU Rekonsiliasi UAKPA 2016-2020



Tabel 3.34
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Rekonsiliasi UAKPA

IKU	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	97	99.49	97	99.57	98	99.76	98.1	100	98.1	99.91

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk mendorong KPPN agar selalu melakukan upaya terus menerus dalam pelaksanaan rekonsiliasi seluruh UAKPA lingkup wilayah kerjanya.

Isu Utama:

Masih terdapat satker yang kurang paham/tidak tahu jadwal periode open dan closed period upload e-rekon SAIBA

Implikasi:

Keterlambatan akan berpengaruh pada capaian IKU

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Penerbitan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat meng-upload data e-rekon SAIBA

- Mengingatkan kepada satker melalui surat, telepon, dan telegram mengenai batas waktu / open period upload data e-rekon SAIBA bulan berkenaan

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring dan Evaluasi kepada satker

I. Nilai rata-rata *hard competency* pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan *hard competency* pegawai.

Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan, yang mencakup 70% berisi pengetahuan tentang tugas dan fungsi, serta 30% pengetahuan di luar tugas dan fungsi.

Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing.

Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes *hard competency* namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available).

Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol).

Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

Formula IKU ini adalah

Jumlah nilai hasil tes *hard competency* yang diperoleh pegawai

Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes *hard competency*

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan.

Rincian IKU ini adalah :

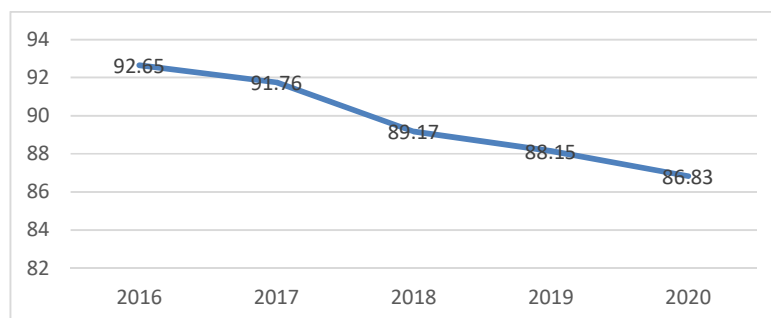
Tabel 3.35

Penjelasan Capaian IKU *Hard Competency*

Total Nilai	1042
Total Nilai	12
Rata-rata	86.83

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2016 sebesar 92.65, 2017 sebesar 91.76, 2018 sebesar 89.17; 2019 sebesar 88.15; dan 2020 sebesar 86.83.

Grafik 3.12

Capaian IKU *Hard Competency* 2016-2020

Tabel 3.36

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Edukasi dan Komunikasi

IKU	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	75	92.65	75	91.76	77	89.17	77	88.15	77	86.83

Tujuan:

IKU ini bertujuan mendorong Kepala KPPN sebagai pimpinan unit agar secara berkelanjutan selalu melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi para pegawai.

Isu Utama:

Kurangnya pemahaman proses bisnis dan aturan secara merata/menyeluruh bagi pegawai di satu seksi dapat mengakibatkan rendahnya capaian IKU ini.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Penyelenggaraan GKM secara periodik dan intensif.
- Mempelajari aturan yang berlaku pada masing-masing seksi

Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengadakan diskusi dan sharing sessions secara berkala di satu seksi untuk membahas aturan dan SOP di seksi lain serta review soal-soal tahun sebelumnya sebagai bahan referensi pembelajaran.
- Meningkatkan pengetahuan untuk mendapatkan nilai yang memenuhi standar IKU.

m. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb c.q. Bidang SKKI.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

1. Laporan penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Laporan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%)
3. Laporan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%)
4. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional dan laporan pengelolaan pengaduan (bobot: 10%)

Formula IKU ini adalah hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

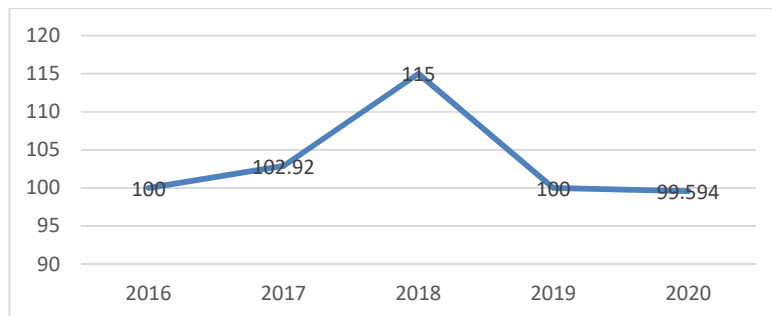
Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan tahunan.

Capaian IKU ini berdasarkan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor ND-85.WPB.29/2020 tanggal 17 November 2020 tentang Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2020 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo KPPN Gorontalo mendapatkna nilai 99,594.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU inipada 2016 sebesar 100, pada tahun 2017 sebesar 102.92, 2018 sebesar 115, tahun 2019 sebesar 100 dan 2020 sebesar 99,594.

Grafik 3.13

Capaian IKU Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2016-2020



Tabel 3.37

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tugas Kepatuhan Internal

IKU	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	90	100	90	102.92	90	115	90	100	80	99.594

Tujuan:

Untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Kanwil DJPb

Isu Utama:

Pelaporan/evaluasi atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern bersifat dinamis sehingga penyesuaian-penyesuaian terkait dengan format, mekanisme dan periode harus segera dilakukan secara konsisten karena akan berdampak pada hasil penilaian evaluasi. Penilaian hasil evaluasi penerapan PPI dilakukan oleh Kanwil DJPb.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Menyusun laporan dan menyampaikannya secara tepat waktu.
- Menyusun laporan PPI dengan format baru sesuai KMK 940
- Melakukan update ketentuan terkait pemantauan pengendalian intern

Rekomendasi Rencana Aksi

Membuat kalender pelaporan KI

n. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis **Strategy Focused Organization**

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip **Strategy Focused Organization (SFO)**. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2020.
- b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2019.

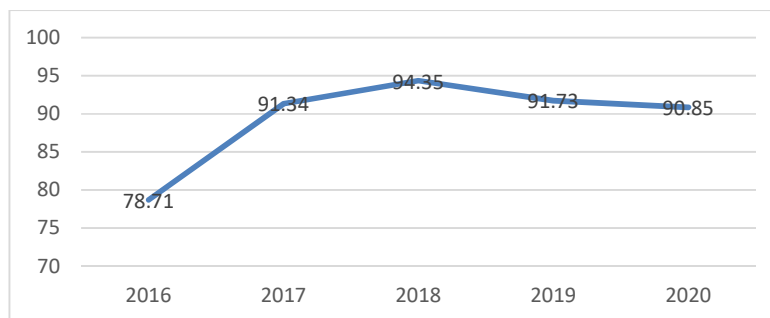
Formula IKU ini adalah nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat *take last known* dan tahunan.

Capaian IKU ini berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-303/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020, KPPN Gorontalo mendapatkan nilai 90,85.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2016 sebesar 78.71, 2017 sebesar 91.34, 2018 sebesar 94,35, tahun 2019 sebesar 91,73 dan 2020 90,85.

Grafik 3.14

Capaian IKU *Strategy Focused Organization* 2016-2020

Tabel 3.38

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Edukasi dan Komunikasi

IKU	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	79	78.71	79	91.34	81	94.35	83	91.73	83	90.85

Tujuan:

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Isu Utama:

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di KPPN Gorontalo dilakukan langkah-langkah peningkatan kualitas kinerja. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas kinerja di lingkungan ditjen perbendaharaan, kantor pusat ditjen perbendaharaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit-unit masing-masing.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Pelaksanaan dialog kinerja organisasi dan individu

- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan matriks SFO

Rekomendasi Rencana Aksi

Merutinkan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.

o. Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan

Program literasi perbendaharaan perlu untuk dilakukan penguatan terstruktur dan berkualitas yang diarahkan pada persiapan implementasi jabatan fungsional khususnya pada aktivitas pengembangan profesi yang meliputi:

- 1) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diedarkan secara nasional atau internasional
- 2) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian
- 3) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang tidak dipublikasikan namun didokumentasikan di perpustakaan
- 4) Menjadi pengajar/pelatih sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional
- 5) Menjadi pembicara/peserta seminar/lokakarya/konferensi dalam bidang tugas jabatan fungsionalnya
- 6) Menjadi pembicara/peserta delegasi ilmiah
- 7) Pembuatan tulisan berupa opini pribadi yang dimuat koran lokal, nasional, maupun internasional.

Program literasi perbendaharaan perlu dilanjutkan dengan cakupan pejabat eselon III dan IV di Kanwil DJPb dan pejabat eselon IV di KPPN.

Tahapan pelaksanaan program Literasi Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

Tahapan 1 : penguatan proses dan penguatan konten.

- a) Membaca dan menyusun pertanyaan ilmiah dengan berpikir kritis.
- b) Mengidentifikasi dan menyusun data/informasi/bukti yang diperlukan dalam penelitian ilmiah.
- c) Menarik dan mengevaluasi kesimpulan berdasarkan data/informasi/bukti secara relevan.
- d) Mengkomunikasikan kesimpulan secara tepat berdasarkan data/informasi/bukti yang valid.

e) Mendemonstrasikan penggunaan konsep dalam situasi yang berbeda.

Tahapan 2 : penguatan konten terdiri dari:

- a) Memilih topik.
- b) Mengumpulkan ide (brainstorming)
- c) Menyusun dan melakukan penelitian (research).
- d) Menyusun pernyataan penelitian (tesis)
- e) Merencanakan tulisan (outline)
- f) Menyusun tulisan
- g) Merevisi dan mengedit tulisan (editing)
- h) Membaca ulang kembali dan memeriksa tulisan (proofread).

Tahapan 3 : Juli sd Desember, diperoleh dari nilai tulisan

Tahapan 3 : implementasi konteks

- a) jurnal ilmiah yang diusulkan dipublikasikan pada Indonesia Treasury Update (Itrev).
- b) tulisan yang diusulkan dipublikasikan pada Forum Kajian Perbendaharaan (FKP).
- c) tulisan opini yang diusulkan dipublikasikan pada media lokal
- d) tulisan opini yang diusulkan dipublikasikan pada media nasional atau internasional.
- d) tulisan yang didokumentasikan untuk perpustakaan

Kemudian dilakukan perubahan definisi IKU pada triwulan II 2020

Program Literasi Perbendaharaan dicanangkan pada tahun 2018 sebagai salah satu program Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018 dan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-4/PB/2018 tentang Program Perbendaharaan Menulis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Berdasarkan nota dinas Sekretaris DJPb nomor ND-890/PB.1/2020 tanggal 11 Maret 2020 hal Pelaksanaan Pengembangan Literasi Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020, Program Literasi Perbendaharaan dilaksanakan oleh para pejabat eselon III dan IV Kanwil DJPb serta para pejabat eselon IV di KPPN dan dikembangkan dengan konsep sebagai berikut:

Tahapan 1, penguatan proses literasi. Nilai diperoleh dari nilai e-learning dengan bobot 25%.

Bukti raw data kegiatan e-learning yaitu nilai yang diperoleh secara online dari aktivitas e-learning

Tahapan 2, penguatan konten. Nilai diperoleh dari nilai training (IHT) dengan bobot 35%.

Bukti raw data untuk IHT adalah nilai aktivitas yang diberikan oleh trainer IHT.

Tahapan 3, penyusunan tulisan. Nilai diperoleh dari nilai tulisan yang telah dikirimkan dan/atau dipublikasikan dengan bobot 40%.

Bukti raw data berupa dokumentasi yang telah disediakan pada Forum Perbendaharaan dengan tema perbendaharaan negara, keuangan, dan ekonomi yang diterbitkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan, berupa foto, gambar, atau daftar.

Pada Kepala KPPN, ditetapkan IKU dalam rangka pembinaan pelaksanaan program Literasi Perbendaharaan ini.

Kategori tulisan	Uraian
1	Diterima untuk dipublikasikan pada Jurnal ITRev atau jurnal ilmiah lainnya yang telah terakreditasi.
2	Diterima untuk direviu pada Jurnal ITRev atau jurnal ilmiah lainnya yang telah terakreditasi.
3	Diterima untuk dipublikasikan pada Jurnal Manajemen Perbendaharaan atau jurnal ilmiah lainnya yang belum terakreditasi.
4	Diterima untuk direviu pada Jurnal Manajemen Perbendaharaan atau jurnal ilmiah lainnya yang belum terakreditasi.
5a	Diterbitkan di media cetak nasional tier 1. Contoh: Harian Kompas, Harian Jakarta Post, dan Harian Bisnis Indonesia.
5b	Diterbitkan di media cetak nasional tier 2. Contoh: Harian Media Indonesia, Harian Republika, Harian Jawa Pos, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Tabloid Kontan, dan Majalah SWA
5c	Diterbitkan di media online nasional. Contoh: kompas.com, detik.com, jakartapost.com, mediaindonesia.com, bisnis.com, republika.co.id, jawapos.com, tempo.co, tirta.id, gatra.com, dan swa.co.id
6	Diterbitkan di media milik Kementerian Keuangan. Contoh: Media Keuangan, situs web Kementerian Keuangan, Majalah Treasury Indonesia, dan Panduan Teknis.
7a	Diterbitkan di media cetak lokal.
7b	Diterbitkan di media online lokal.

8	Diterbitkan di media online lokal.
---	------------------------------------

Formula IKU ini yaitu Kemenkeu-Three KPPN, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata nilai literasi yang dicapai oleh pejabat eselon IV di KPPN.

Tabel 3.39

Kategori Penulisan Literasi Eselon 4 KPPN Gorontalo

No	Nama	NIP	Jabatan	Kategori Tulisan	Keterangan
1.	Rahmat Kurniawan	197305091994021001	Kasubbag Umum	8	Diterbitkan di Forum Perbendaharaan pada tanggal 25 Desember 2020
2.	Dani Mei Nugroho	198305182004121003	Kasi PD	8	Diterbitkan di Forum Perbendaharaan pada tanggal 9 Desember 2020
3	Adi Vibriyanto	198307132004121003	Kasi MSKI	4	Diterima dan dilakukan <i>review</i> pada Jurnal Manajemen Perbendaharaan (JMP) berdasarkan email Jurnal DJPB (jurnal.djpb@kemenkeu.go.id) pada tanggal 9 November 2020
4	Avviz Elfarij	198311282004121002	Kasi Bank	8	Diterbitkan di Forum Perbendaharaan pada tanggal 27 Desember 2020
5.	Amran Budi Suharsono	196501241985101001	Kasi MSKI	8	Diterbitkan di Forum Perbendaharaan pada tanggal 18 Desember 2020

Tabel 3.40

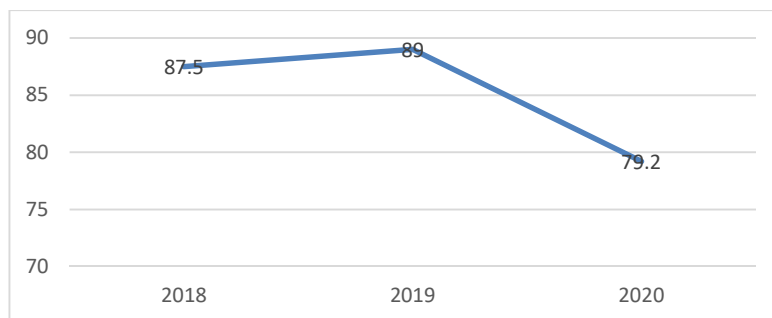
Penjelasan Capaian IKU Literasi

Kepala Subbagian Umum	78
Kepala Seksi Pencairan Dana	78
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal	84
Kepala Seksi Bank	78
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi	78
Rata-Rata	79.2

IKU ini baru muncul di tahun 2018. Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2018 sebesar

87,5, tahun 2019 sebesar 89, dan tahun 2020 mendapatkan nilai 79,2 dengan rincian sebagai berikut.

Grafik 3.15
Capaian IKU Literasi 2018-2020



Tabel 3.41
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Literasi

IKU	2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	72	87.5	72	89	74	79.2

Tujuan IKU:

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas literasi para pejabat di lingkup DJPb.

Isu Utama:

IKU tahun 2020 ini penilaian IKU Kepala Kantor didasarkan pada penilaian IKU para kepala seksi, sehingga Kepala Kantor hanya menerima nilai saja dan melakukan supervisi atas literasi yang dibuat oleh kepala seksi.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Mencari bahan untuk penyusunan karya tulis.
- Pelatihan karya tulis

Rekomendasi Rencana Aksi

- Mengundang dosen tamu untuk mengisi seminar karya tulis
- Melakukan persiapan untuk pembuatan karya tulis
- Mengikuti e-learning di KLC

- Mengadakan pelatihan menulis secara online/tatap muka

p. Persentase pemenuhan BMN sesuai standar

Pengelolaan BMN yang optimal diukur melalui beberapa komponen, sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan RP4

Kesesuaian pelaksanaan RP4 diukur dari persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan (pelaksanaan pemanfaatan diukur sampe penerbitan SK sewa), Persentase pelaksanaan Alih Fungsi atas Rencana Penggunaan, dan persentase penghapusan atas rencana penghapusan

2. Persentase completeness data master aset

Master Aset di aplikasi SIMAN berisi data-data informasi manajemen terkait BMN. Data-data ini kemudian digunakan oleh berbagai plugin di SIMAN seperti sensus BMN, RKBMN, Wasdal, dsb.

Pencatatan BMN yang tertib atas aset tersebut penting peranannya dalam mendukung pengambilan keputusan dan monitoring. Profil BMN penting untuk diisi lengkap pada master aset di aplikasi SIMAN. Profil BMN yang perlu dilengkapi untuk bangunan yaitu detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan), foto, batas dan GPS, ruangan, fasilitas, dan konstruksi. Sedangkan untuk tanah yaitu detail BMN (alamat, luas, pengguna), foto, batas dan GPS, dokumen, bangunan, pengelolaan, dan status hukum. Adapun jenis BMN yang menjadi target yaitu Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Tanah dan Bangunan) dan dan Bangunan Gedung Kantor Permanen

3. Persentase PNPB atas pengelolaan BMN

Diukur dari realisasi PNPB atas pengelolaan BMN dibandingkan dengan target pendapatan PNPB atas pengelolaan BMN. Data realisasi PNPB diambil dari Laporan realisasi pendapatan masing-masing unit.

4. Persentase penyelesaian PSP atas penambahan jumlah BMN

Dalam rangka peningkatan pengelolaan data BMN yang optimal pada Kantor Vertikal DJPb, dilakukan evaluasi oleh Kantor Pusat berdasarkan pengukuran sebagai berikut:

- Kesesuaian pelaksanaan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapus

a. Persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan

$$\text{Realisasi a} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan sewa BMN}}{\text{Jumlah Rencana Pemanfaatan dalam bentuk sewa}} \times 100\%$$

b. Persentase pelaksanaan Alih Fungsi atas Rencana Penggunaan

$$\text{Realisasi b} = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan alih fungsi BMN}}{\text{Jumlah Rencana Penggunaan dalam bentuk alih fungsi}} \times 100\%$$

c. Persentase Pelaksanaan Penghapusan atas Rencana Penghapusan

$$\text{Realisasi c} = \frac{\text{Jumlah BMN yang ditetapkan SK Penghapusan}}{\text{Jumlah BMN dalam rencana penghapusan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi 1} = \frac{\text{Realisasi a} + \text{Realisasi b} + \text{Realisasi c}}{3} \times 100\%$$

➤ Persentase completeness data master asset

$$\text{Realisasi 2} = \frac{\text{Jumlah profil master aset yang diisi lengkap}}{\text{Jumlah profil master aset}} \times 100\%$$

➤ Persentase PNPB atas pengelolaan BMN

$$\text{Realisasi 3} = \frac{\text{Jumlah nominal PNPB atas pengelolaan BMN}}{\text{Jumlah target PNPB atas pengelolaan BMN}} \times 100\%$$

➤ Persentase penyelesaian PSP atas penambahan jumlah BMN

$$\text{Realisasi 4} = \frac{\text{Jumlah BMN unit yang diusulkan PSP ke Pengguna Barang}}{\text{Jumlah penambahan BMN unit berdasarkan laporan SIMAN Semester II 2019}} \times 100\%$$

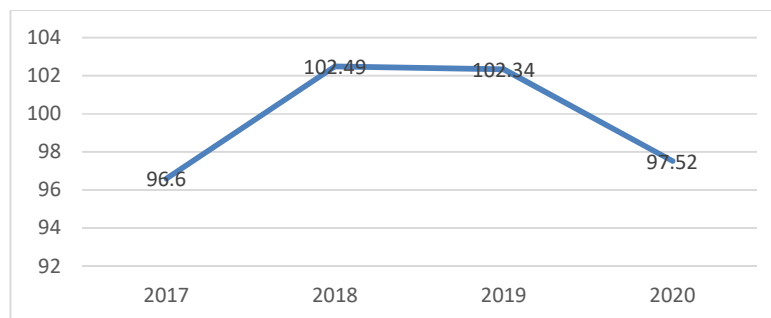
Formula dari IKU Ini yaitu hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan BMN yang optimal oleh Kantor Pusat DJPb.

Capaian IKU ini baru muncul pada tahun 2017. Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat take last known dan semesteran.

Capaian IKU ini pada semester II berdasarkan nota Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-3/PB.1/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penyampaian Nilai Capaian IKU Persentase Pengelolaan BMN yang Optimal Tahun 2020 Kanwil dan KPPN di Lingkungan DJPb, KPPN Gorontalo mendapat nilai 102,34.

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2017 sebesar 96.6%, 2018 sebesar 102,49%, tahun 2019 sebesar 102,34%, dan pada tahun 2020 sebesar 97.52%.

Grafik 3.16
Capaian IKU Pengelolaan BMN 2016-2020



Tabel 3.42
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Edukasi dan Komunikasi

IKU	2017		2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	90	96.6	92	102.49	92	102.34	92	97.52

Tujuan:

Untuk mendorong Unit Vertikal DJPb dalam menyusun/merumuskan strategi pengelolaan BMN secara optimal

Isu Utama:

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak. Strategi pengelolaan BMN secara optimal berpedoman pada SE-32/PB/2016.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap BMN yang ada sehingga menjadi sesuai dengan standar serta memastikan bahwa pengadaan BMN di masa yang akan datang telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Telah dilakukan penginputan pada aplikasi RP4 untuk penghapusan BMN yang rusak berat. Penghapusan dilakukan secara bertahap, mulai tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.

Rekomendasi Rencana Aksi

- Pengadaan BMN sesuai standar
- Perbaikan dan penyesuaian atas BMN yang tidak sesuai dengan standar jika dimungkinkan, dan penghapusan untuk BMN yang rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upgrade. Sesuai dengan RP4, penghapusan atas barang tersebut akan diusulkan secara bertahap pada tahun 2020,2021 dan 2022.

q. Nilai Kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Ditjen Perbendaharaan. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- b) keakuratan data laporan keuangan
- c) kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d) Penyajian Laporan Keuangan
- e) Partisipasi dan
- f) Laporan BMN.

Formula dari IKU ini adalah total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB.

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2020 dengan target sebesar 81, pada tahun 2020 KPPN Gorontalo memperoleh nilai 93,30 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor KEP-97/WPB.29/2020 tentang Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Tabel 3.43
Penjelasan Capaian IKU LK UAKPA/UAKPB

No	Penilaian	KPPN Gorontalo
A	Nilai UAKPA	
	Ketepatan penyampaian LK UAKPA	9,5
	Keakuratan data LK UAKPA	20
	Kepatuhan pelaksanaan anggaran UAKPA	10
	Penyajian LK UAKPA	9
	Beban kerja UAKPA	4
	Partisipasi UAKPA terkait penyelesaian LK	14
	Jumlah	66,5
B	Nilai UAKPB	
	Ketepatan waktu penyampaian laporan	5
	Kebenaran kodefikikasi BMN	5
	Kejelasan dan akurasi kertas kerja	5
	Kejelasan CaLK BMN	8,8
	Kebenaran dan kelengkapan lampiran	3
	Jumlah	26,8
C	Jumlah nilai UAKPA dan UAKPB	93,3

Tujuan

IKU ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tingkat UAKPA/UAKPB

Isu Utama

Capaian IKU ini mencerminkan capaian output terkait kinerja pelaksanaan anggaran KPPN sebagai satker. Unsur yang diukur pada IKU ini dilihat dari penilaian komponen hasil dari SMART dan komponen proses dari IKPA.

Implikasi

Capaian output, kinerja anggaran serta realisasi satker sesuai yang direncanakan dan optimal.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

- Menyusun rencana kegiatan tahunan satker selama tahun 2020

- Melaksanakan dan mengontrol realisasi satker sesuai RPD

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dana rangka kontrol kesesuaian RPD dan realisasi

r. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

- 1) Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).
- 2) Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar - 20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.
- 3) Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).
- 4) Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-

K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).

5) Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.

6) Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN.

7) Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP.

8) Perencanaan Kas (Renkas), sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.

9) Penyampaian LPJ, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio LPJ tepat waktu terhadap seluruh LPJ yang disampaikan ke KPPN.

10) Pengembalian SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

11) Retur SP2D, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit.

12) Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap).

13) Pagu Minus, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya.

14) Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

Formula IKU ini sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi IKU} = & [(\% \text{ capaian keluaran} \times 30\%) + (\% \text{ efisiensi} \times 15\%) + (\% \text{ konsistensi} \times 10\%) + (\% \text{ penyerapan anggaran atas pagu netto} \times 15\%)] + \\ & [(\% \text{ penyelesaian tagihan} \times 4\%) + (\% \text{ penyampaian data kontrak} \times 3\%) + (\% \text{ pengelolaan UP} \times 4\%) + (\% \text{ perencanaan kas} \times 2\%) + (\% \text{ penyampaian LPJ} \times 2\%) + \\ & (\% \text{ pengembalian SPM} \times 3\%) + (\% \text{ retur SP2D} \times 3\%) + (\% \text{ revisi DIPA} \times 5\%) + (\% \text{ pagu minus} \times 2\%) + (\% \text{ dispensasi SPM} \times 2\%)] \end{aligned}$$

No. Komponen Pengukuran				Bobot
Komponen Hasil				
1.	Capaian Keluaran	x	30%	70%
2.	Efisiensi	x	15%	
3.	Konsistensi	x	10%	
4.	Penyerapan anggaran atas pagu netto	x	15%	
Komponen Proses				
5.	Penyelesaian tagihan	x	4%	30%
6.	Penyemapaian data kontrak	x	3%	
7.	Pengelolaan UP	x	4%	
8.	Perencanaan Kas	x	2%	
9.	Penyampaian LPJ	x	2%	
10.	Pengembalian SPM	x	3%	
11.	Retur SP2D	x	3%	
12.	Revisi DIPA	x	5%	
13.	Pagu Minus	x	2%	
14.	Dispensasi SPM	x	2%	

Capaian Keluaran

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

$$CKK = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{\text{RVK ke } i}{\text{TVK ke } i} \times \left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)$$

Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

$$NE = 90\% + \left(\frac{E}{20} \times 20 \right)$$

Konsistensi

$$\% \text{ konsistensi} = \frac{\sum_{i=1}^n \% \text{ konsistensi per bulan}}{n}$$

$$\% \text{ konsistensi per bulan} = \left(1 - \left(\frac{|RPD - \text{Realisasi Penyerapan}|}{RPD} \right) \right) \times 100\%$$

Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto

$$\text{Penyerapan} = \frac{\text{realisasi penyerapan anggaran atas pagu netto}}{\text{pagu netto}} \times 100\%$$

Pagu netto = Total pagu bruto – (pagu belanja pegawai + self blocking + hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan + pagu dana khusus)

Realisasi penyerapan anggaran atas pagu neto = Total realisasi bruto – (realisasi belanja pegawai + realisasi dana khusus)

Untuk 10 indikator yang termasuk Komponen Proses didapatkan dari IKPA Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan.

Realisasi IKU dihitung menggunakan bobot tertimbang dari indikator yang tersedia pada triwulan tersebut.

Indikator	Bobot	Periode Pelaporan	Cascade		Trajectory			
			Kasatker	Non-Satker	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1. Capaian Keluaran (SMART DJA)	30%	Tahunan	√	√	-	-	-	√
2. Efisiensi (Modifikasi on SMART DJA)	15%	Tahunan	√	√	-	-	-	√
3. Konsistensi (Modifikasi SMART DJA dan IKPA)	10%	Triwulan	√	√	√	√	√	√
4. Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto (based SE-35/2017)	15%	Triwulan	√	√	√	√	√	√
5. Penyelesaian Tagihan (based IKPA)	4%	Triwulan	√	√	√	√	√	√
6. Data Kontrak (based IKPA)	3%	Triwulan	√	√	√	√	√	√
7. Pengelolaan UP (based IKPA)	4%	Triwulan	√	-	√	√	√	√
8. Perencanaan Kas (based IKPA)	2%	Triwulan	√	-	√	√	√	√
9. Penyampaian LPJ (based IKPA)	2%	Triwulan	√	-	√	√	√	√
10. Pengembalian SPM (based IKPA)	3%	Triwulan	√	-	√	√	√	√
11. Retur SP2D (based IKPA)	3%	Triwulan	√	-	√	√	√	√
12. Revisi DIPA (based IKPA)	5%	Triwulan	√	√	√	√	√	√
13. Pagu Minus (based IKPA)	2%	Tahunan	√	-	-	-	-	√
14. Dispensasi SPM (based IKPA)	2%	Tahunan	√	-	-	-	-	√
Jumlah	100%	100%			95%	95%	95%	95%

Pada Triwulan I 2020, dilakukan perubahan formula sebagai berikut:

Realisasi IKU = 40% Nilai IKPA + 60% nilai SMART

Target IKU ini telah ditetapkan Oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indikator Kinerja Utama ini bersifat average dan triwulan.

Berikut tabel perhitungan realisasi IKU ini.

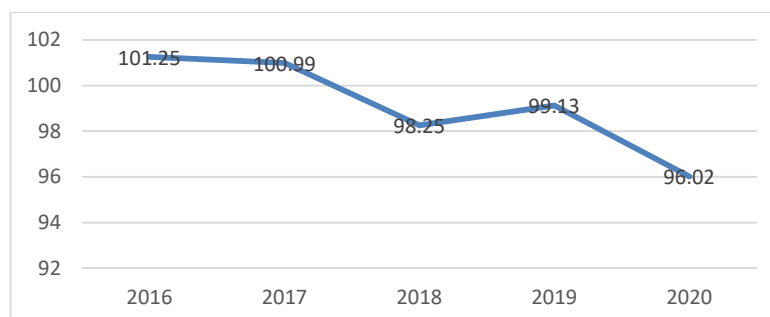
Tabel 3.44
Penjelasan Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKU kualitas pelaksanaan anggaran	Bobot	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Nilai	Hasil	Nilai	Hasil	Nilai	Hasil	Nilai	Hasil
Capaian Keluaran	43.5							100.00%	53.84
Efisiensi	28.6							6.26%	
Konsistensi	18.2							98.15%	
Penyerapan Anggaran	9.7							98.96%	
Revisi DIPA	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92.47	N/A	39.48
Halaman 3 DIPA	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
Pagu Minus	8	N/A	N/A	N/A	N/A	99.35%		100%	
Data Kontrak	5	N/A	N/A	N/A	N/A	0%		0%	
Pengelolaan UP TUP	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100%		100%	
LPJ Bendahara	15	N/A	N/A	N/A	N/A	100%		100%	
Dispensasi SPM	0	N/A	N/A	N/A	N/A	100%		100%	
Penyerapan Anggaran	10	N/A	N/A	N/A	N/A	0%		100%	
Penyelesaian tagihan	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100%		0%	
Konfirmasi capaian output	10	N/A	N/A	N/A	N/A	100%		100%	
Retur SP2D	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100%		100%	
Renkas	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0%		0%	
Kesalahan SPM	5	N/A	N/A	N/A	N/A	85%		85%	
Capaian			N/A		N/A		92.47%		93.32%

Capaian IKU ini telah melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Sementara Capaian IKU ini pada tahun 2016 sebesar 101.25%, 2017 sebesar 100.99%, 2018 sebesar 98.25%, pada tahun 2019 sebesar 99.13% dan 2020 sebesar 96.02%.

Grafik 3.17

Capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2016-2020



Tabel 3.45
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95	101.25	95	100.99	95	98.25	95	99.13	95	96.02

Tujuan:

Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, penyampaian LPJ, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.

Isu Utama

Capaian IKU ini mencerminkan capaian output terkait kinerja pelaksanaan anggaran KPPN sebagai satker. Unsur yang diukur pada IKU ini dilihat dari penilaian komponen hasil dari SMART dan komponen proses dari IKPA.

Implikasi

Capaian output, kinerja anggaran serta realisasi satker sesuai yang direncanakan dan optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Menyusun rencana kegiatan tahunan satker selama tahun 2020
- Melaksanakan dan mengontrol realisasi satker sesuai RPD

Rekomendasi Rencana Aksi

- Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran setiap bulan dana rangka kontrol kesesuaian RPD dan realisasi

7. Inisiatif Strategis

a. Optimalisasi Transaksi Pembayaran Non Tunai di Tingkat KPPN

- Sasaran strategis : Komunikasi dan Edukasi yang Berkesinambungan
- IKU : Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
- Penjelasan

Implementasi kebijakan non tunai di tingkat KPPN masih menemui kendala, diantaranya rendahnya realisasi pembayaran non tunai oleh satker dikarenakan belum adanya pemahaman yang memadai tentang prosedur transaksi dan kekhawatiran atas keamanan transaksi non tunai. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan melalui pelaksanaan bimtek dan sosialisasi. Sosialisasi terkait regulasi perpajakan untuk transaksi non tunai yang baru juga perlu untuk segera disosialisasikan. Kegiatan sosialisasi pembayaran non tunai telah dilakukan pada bulan Januari 2020.

b. Pelaksanaan coaching and counselling

- Sasaran Strategis : Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal
- IKU : Nilai rata-rata *hard competency* pegawai
- Penjelasan

IS ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai berupa kompetensi-kompetensi teknis dan non teknis melalui pendekatan-pendekatan kemitraan, melibatkan proses kreatif guna memaksimalkan potensi pegawai. Coaching dilakukan dengan metode/teknik mendengarkan, bertanya dan menggali agar individu/pegawai menemukan potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan tertentu. Counseling diperlukan dalam konteks untuk memelihara/menjaga hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan yang berorientasi pada masalah-masalah psikologis (bersifat pribadi) yang mengganggu kinerja pegawai, dengan teknik-teknik mendengarkan, bertanya, menggali masa lalu, dan memberikan solusi untuk peningkatan kinerja pegawai.

Pada triwulan I 2020 capaian IS ini adalah 90%, pada triwulan II adalah 99.8%, pada triwulan III 97.4%, dan pada triwulan capainnya adalah 100%.

c. Pelaksanaan Monev DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa

- Sasaran Strategis : Monev Perbendaharaan
- IKU : Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa
- Penjelasan

Pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik (BOS) dan Dana Desa diarahkan pada penyediaan informasi dan hambatan pelaksanaan penyaluran, penyediaan data analisis, identifikasi permasalahan dan rekomendasi atas permasalahan guna dapat menyusun kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien.

d. Pelaksanaan GKM dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang

- Sasaran Strategis : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal
- IKU : Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB
- Penjelasan

IS ini digunakan untuk mendukung IKU LK tingkat UAKPA dan UAKPB. Kegiatan GKM telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2020 dengan narasumber dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

e. Efisiensi Atas Belanja Birokrasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan

- Sasaran Strategis : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal
- Penjelasan

Efisiensi dilakukan atas belanja bahan percetakan dan konsumsi, belanja perjalanan dinas dalam negeri kecuali dalam rangka pekantikan, mutase, diklat dan bantuan evaluasi non local dalam rangka pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai yang terkena dampak bencana alam, serta RDK dan konsinyering.

Efisiensi atas belanja birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan focus pada belanja bahan dan konsumsi serta belanja perjalanan dinas. Total pagu dana setelah revisi penghematan tanggal 13 Mei 2020 pada ketiga jenis belanja tersebut (seluruh output) adalah sebesar Rp 248.624.000. Target yang ditetapkan minimal 10% (Rp 24.862.400 dibulatkan menjadi Rp 25.000.000) Sampai dengan akhir Desember 2020 penghematan yang bisa dilakukan (dana tidak terserap) berjumlah Rp 24.849.875.

B. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Bruto KPPN Gorontalo dalam DIPA TA 2020 sebesar Rp2.197.587.000 dikurangi Pagu Belanja Pegawai dan Hasil Efisiensi (Pagu Objek Efisiensi – Realisasi Objek Efisiensi) masing-masing sebesar Rp332.380.000 dan Rp17.347.765 sehingga Pagu Penyerapan Anggaran Neto KPPN Gorontalo menjadi sebesar Rp1.847.859.235.

Realisasi Pagu Anggaran Bruto KPPN Gorontalo TA 2020 sebesar Rp2.174.831.073 dikurangi Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp331.209.000 sehingga Realisasi Penyerapan Anggaran Neto KPPN Gorontalo TA 2019 menjadi sebesar Rp1.843.622.073.

Pagu Penyerapan Anggaran Neto KPPN Gorontalo dalam DIPA TA 2020 sebesar Rp1.847.859.235. Realisasi Penyerapan Anggaran Neto KPPN Gorontalo TA 2020 sebesar Rp1.843.622.073 atau sebesar 99,77% sehingga menyisakan anggaran hanya sebesar Rp4.237.162.

Tabel 3.46
Pagu dan Realisasi Belanja KPPN Gorontalo 2016-2020

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	1,667 636,000	1,666, 118,813	1,601, 680,000	1,550, 716,819	383,100 ,000	366,025, 000	341,485 ,000	326,655, 000	332,380 ,000	331,209, 000
Belanja Barang	1,521, 525,000	1,484, 312,696	1,660, 180,000	1,659, 458,983	1,638, 155,000	1,637, 850,843	1,980, 181,000	1,979, 664,795	1,673, 543,000	1,652, 065,073
Belanja Modal	80,910, 000	80,874, 000	876,301 ,000	876,223, 850	446,863 ,000	446,833, 000	32,124, 000	31,385, 000	191,664 ,000	191,557, 000
Jumlah	3,270 071,000	3,231, 305,509	4,138, 161,000	4,086, 399,652	2,468, 118,000	2,450, 708,843	2,353, 790,000	2,337, 704,795	2,197, 587,000	2,174, 831,073

C. Kinerja Lainnya

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

a) Solusi Pasti “Telegram”

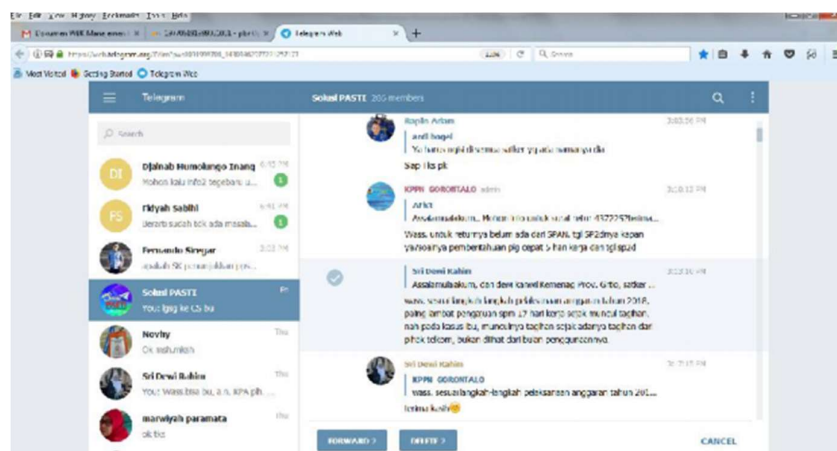
KPPN Gorontalo mempunyai inovasi “Pemanfaatan Aplikasi Telegram sebagai Media Komunikasi dan *Support Group* Satker lingkup KPPN Gorontalo”.

Pemanfaatan Aplikasi Telegram dilakukan untuk membuat grup “Solusi Pasti”. Grup ini beranggotakan seluruh pengelola keuangan satuan kerja mitra KPPN Gorontalo seperti KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan Operator Aplikasi. Grup ini bertujuan sebagai sarana komunikasi antara KPPN Gorontalo dengan satuan kerja. Bermotokan “cepat, tepat dan bermanfaat”, grup ini berusaha memberikan respon yang cepat, solusi yang tepat dan informasi yang bermanfaat bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja.

Awalnya grup ini bernama “Rekon Gorontalo” yang khusus melayani konsultasi masalah rekonsiliasi. Namun mengingat respon yang luar biasa dari satker, grup ini dikembangkan bukan sekadar melayani masalah rekonsiliasi namun juga melayani konsultasi lain, seperti layanan strategi penyerapan anggaran, ketepatan waktu penyampaian data kontrak, garansi bank, penyampaian LPJ, dan penyampaian RPD.

Setiap anggota grup bisa berkontribusi dengan memberikan jawaban, solusi dan informasi atas permasalahan yang dikemukakan di grup, juga sebagai sarana untuk *sharing knowledge* dan pengalaman. Dengan adanya grup ini diharapkan tercipta suatu kondisi dimana satuan kerja dapat saling *support* dan saling mengingatkan.

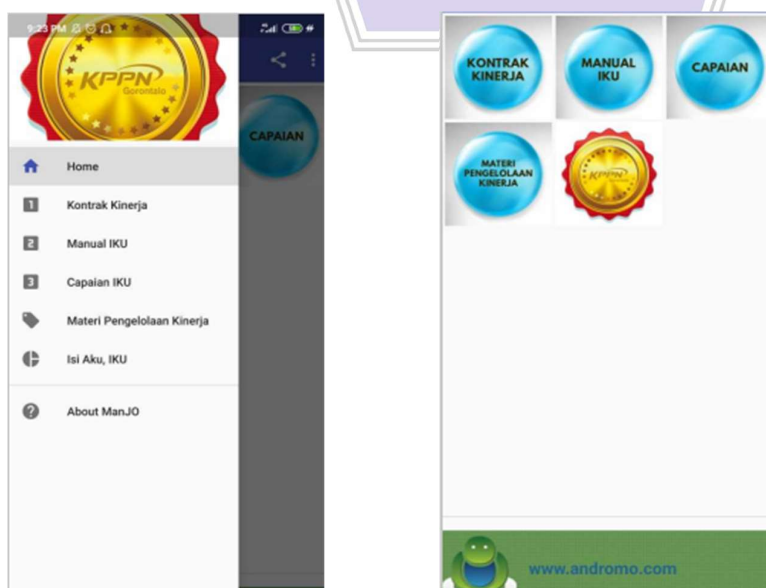
Gambar 3.2
Aplikasi Telegram



b) Aplikasi “Manjo”

Inovasi layanan yang digunakan oleh KPPN Gorontalo untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan kinerja KPPN Gorontalo, yaitu aplikasi “Manjo”.

Gambar 3.3 dan 3.4
Aplikasi Manjo

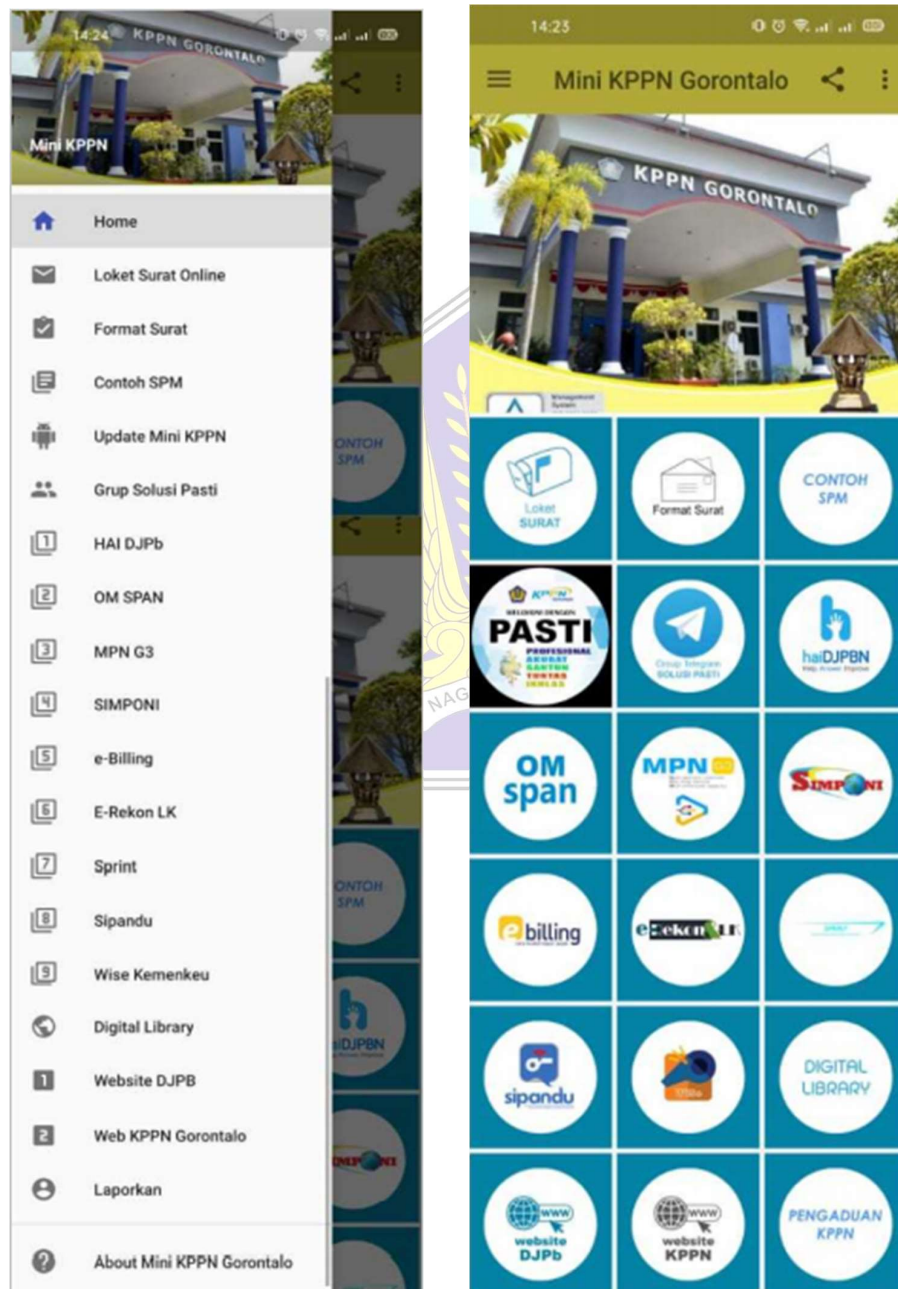


c) Aplikasi “Mini KPPN”

Inovasi layanan lainnya yang digunakan oleh KPPN Gorontalo untuk membantu pekerjaan dan informasi KPPN Gorontalo, yaitu aplikasi “Mini KPPN”. Mini KPPN merupakan aplikasi berbasis android yang memberikan kemudahan dalam mengakses aplikasi-aplikasi penting dalam format satu halaman tampilan.

Gambar 3.5 dan 3.6

Aplikasi Mini KPPN



d) Saling Mengenal Antar Pegawai dan Keluarga (SiWeruh)

Salah satu cara meningkatkan pemantauan terhadap integritas pegawai dan kinerja organisasi adalah dengan mengenali para pegawainya (*know your employee*), untuk itu diperlukan ajang untuk saling mengenal antar pegawai sebagai salah satu bentuk pengawasan secara tidak langsung terhadap pegawai apabila ada indikasi ketidakwajaran. Manfaat utama dari inovasi ini adalah meningkatkan kesadaran khususnya di kalangan pegawai dan *stakeholder* pada umumnya untuk menjaga nilai-nilai integritas dan selalu merasa diawasi oleh orang lain sehingga terhindar dari pelanggaran.

Gambar 3.7

Si Weruh



e) Inovasi Jaga Agar Aman (Si Jaga)

Salah satu cara untuk menjaga dan memelihara aset serta menghindari kemungkinan terhentinya layanan karena gangguan alam adalah dengan pro aktif melakukan mitigasi atas potensi kejadian yang dapat berdampak pada terganggunya pencapaian visi dan misi organisasi. KPPN Gorontalo selalu proaktif dalam usaha memitigasi risiko gangguan alam misalnya kebakaran. Manfaat utama dari inovasi ini adalah meningkatkan kesadaran khususnya di kalangan pegawai akan pentingnya ketangkasan dalam menghadapi bencana, setiap pegawai harus dibekali kemampuan minimum untuk menghadapi kejadian tidak terduga. Misalnya terjadinya kebakaran, dll.

Gambar 3.8

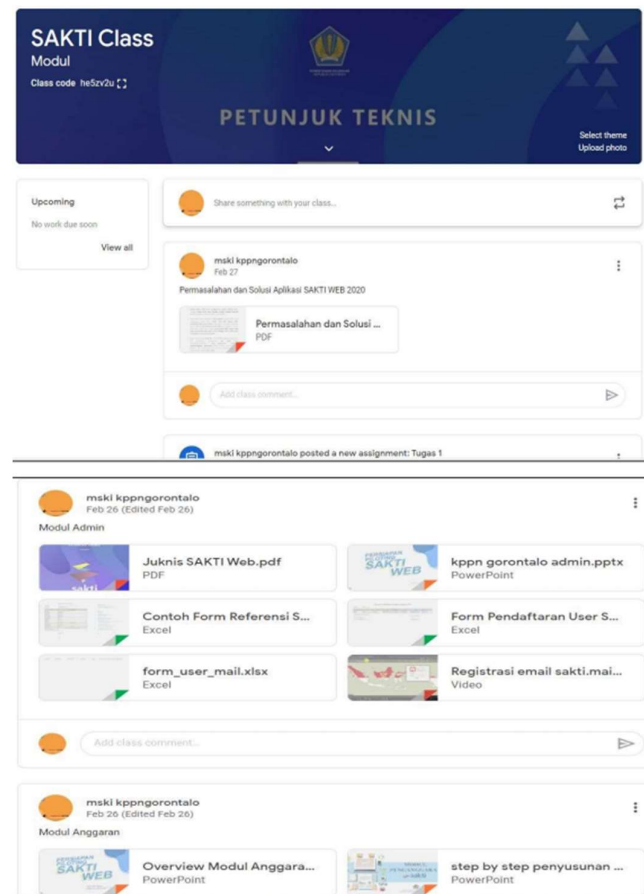
Si Jaga



f) Treasury Classroom KPPN Gorontalo

Sebagaimana Kemenkeu Learning Center (KLC) menyediakan berbagai materi terkait keuangan negara, Treasury Classroom KPPN Gorontalo Classroom turut hadir menyediakan materi terkait perbendaharaan seperti materi tentang Bendahara, Aplikasi SAS, SAKTI, Pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Dengan tampilan yang user friendly, Treasury classroom KPPN Gorontalo juga dapat memberikan tugas untuk pengguna yang mengikuti salah satu kelas. Proses pembelajaran yang mudah terjangkau akan membuat stakeholder mudah dan lebih bersemangat dalam mempelajari aspek-aspek teknis Perbendaharaan yang pada gilirannya akan mempermudah tugas KPPN dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran satker. Inovasi ini terus berkelanjutan dengan selalu mengupdate materi-materi pengelolaan keuangan dan aplikasi. Inovasi ini mudah direplikasi karena sifat aplikasinya yang terbuka difasilitasi oleh google. content dalam treasury classroom KPPN Gorontalo juga terkait dengan hal-hal teknis perbendaharaan sehingga bisa berfungsi sebagai media pembelajaran dengan materi yang sangat diperlukan namun sama untuk semua pengelola keuangan di seluruh Indonesia.

Gambar 3.9
Treasury Classrom KPPN Gorontalo



g) Konfirmasi Penerimaan Negara Online (KOPEN)

Satuan kerja dapat mengirimkan pengajuan konfirmasi setoran penerimaan negara secara online melalui formulir online yang telah dibuat oleh KPPN Gorontalo. Melalui formulir tersebut, satuan kerja mengisi kontak yang dapat dihubungi, nomor surat, hasil scan surat permohonan beserta lampiran dan arsip data computer (ADK). Petugas di KPPN akan mengecek kelengkapan dokumen dan kesesuaian ADK. Jika sudah selesai, petugas KPPN akan melakukan konfirmasi penerimaan setoran negara melalui aplikasi OMSPAN. Petugas di KPPN akan memberikan informasi kepada satuan kerja melalui kontrak yang telah diisi melalui formulir. Jika masih terdapat kesalahan diharuskan memperbaiki kesalahan dan menyampaikan kembali dokumen dan ADK yang salah.

Gambar 3.10

KOPEN

Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, Satuan Kerja menyampaikan Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara disertai Rekapitulasi Daftar Setoran Penerimaan Negara, Bukti Penerimaan Negara dan Arsip Data Komputer (ADK).

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Not masi.kppngorontalo@gmail.com? [Switch account](#)

* Required

Email address *

Your email

Kode Satker *

Your answer

Nomor IIP *

Your answer

Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara, Rekapitulasi Daftar Setoran Penerimaan Negara, Bukti Penerimaan Negara & Arsip Data Komputer (ADK) *

h) Laporan Saldo Rekening Online (SAREO)

Satuan kerja dapat mengirimkan laporan saldo rekening secara online melalui formulir yang sudah dibuat oleh KPPN Gorontalo, melalui formulir tersebut, satuan kerja mengisi data rekening dan mengunggah hasil scan laporan saldo rekening dan rekening koran.

Gambar 3.11

SAREO

Laporan Saldo Rekening

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/KMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, KPA/Kepala Setuan Kerja/Timpinan BLU wajib melaporkan saldo seluruh rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Not mski.kppngorontalo@gmail.com? [Switch account](#)

* Required

Email address *

Your email

Kode Satker *

Your answer

Nomor Rekening *

Your answer

Nama Rekening *

NAGARA DAYA RAKTA

i) **Saling Bertukar Pikiran Antar Pegawai (Rombukiya)**

Sebagai bentuk nyata upaya untuk selalu menjaga institusi dari adanya pelanggaran kode etik/kode perilaku oleh pegawai, maka KPPN Gorontalo menginisiasi pelaksanaan kegiatan bertukar pikiran untuk saling menasihati dan meneguhkan kembali komitmen untuk menjaga nilai-nilai etika sebagai ASN. Kepada setiap pegawai juga dibekali dengan buku saku kode etik pegawai sebagai pengingat untuk selalu menjaga kode etik dan kode perilaku. Selain itu, sebagai bentuk pengingat juga dipasang banner dalam bahasa lokal yang berisi seruan untuk menjaga integritas.

Gambar 3.12 dan 3.13

Rombukiya



2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

a) Penandatanganan Pakta Integritas

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian juga dalam hal pemberantasan korupsi. KPPN Gorontalo telah melakukan inisiatif pemberantasan korupsi dengan

melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dengan antara kepala KPPN dengan semua pegawai baik PNS maupun PPNNP dan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja mitra KPPN Gorontalo.

Hal ini diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk lebih bekerja secara profesional, bersih, dan beritikad baik dalam melakukan pengelolaan keuangan negara demi nusa dan bangsa.

Gambar 3.14

Penandatanganan Pakta Integritas



b) Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia

Selain itu, KPPN Gorontalo telah melakukan sosialisasi anti korupsi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk semua pegawai. Dalam peringatan hari anti korupsi sedunia, KPPN Gorontalo mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi kepada para pegawai melalui *Focus Group Discussion* yang dilakukan di Aula KPPN Gorontalo.

Gambar 3.15
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia



3. Penghargaan

a) Perolehan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pada akhir tahun 2020, KPPN dianugerahi predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas birokrasi yang bersih dan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

Gambar 3.16
Perolehan Predikat Wilayah Bebas Korupsi



b) Peringkat Ke-3 Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A1 Provinsi Tahun 2020

Dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), DJPb memberikan penilaian dan penghargaan pengelolaan kinerja di Lingkungan DJPb Tahun 2020. KPPN Gorontalo mendapatkan peringkat

ketiga dengan nilai 90.85 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-303/PB/2020 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPPN Gorontalo tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020 sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum maka KPPN Gorontalo harus senantiasa memelihara, mengamankan, dan melaksanakan semua kebijaksanaan pemerintah agar APBN dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Selain itu mewujudkan implementasi SPAN agar peran strategis KPPN Gorontalo menjadi lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tidak terdapat capaian kinerja KPPN Gorontalo tahun 2020 yang lebih rendah dari target yang direncanakan. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun selanjutnya, KPPN Gorontalo akan tetap mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Untuk mengoptimalkan kinerja dan kemitraan dengan satker mitra kerja, KPPN Gorontalo terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat dan pegawai tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai serta pedoman/peraturan yang dapat dijadikan landasan/acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, di samping memanfaatkan sarana teknologi informasi sehingga masyarakat atau siapapun yang berhubungan/ berkepentingan dengan KPPN Gorontalo akan merasa sangat senang dan puas karena telah terlayani dengan cepat, cermat, dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku serta memahami visi dan misi Kementerian Keuangan dalam penerapan kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2008.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja 2020 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan maupun kepada semua pihak yang terkait sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo pada periode berikutnya.

LAMPIRAN



KONTRAK KINERJA
NOMOR: 050/PB.38/2020

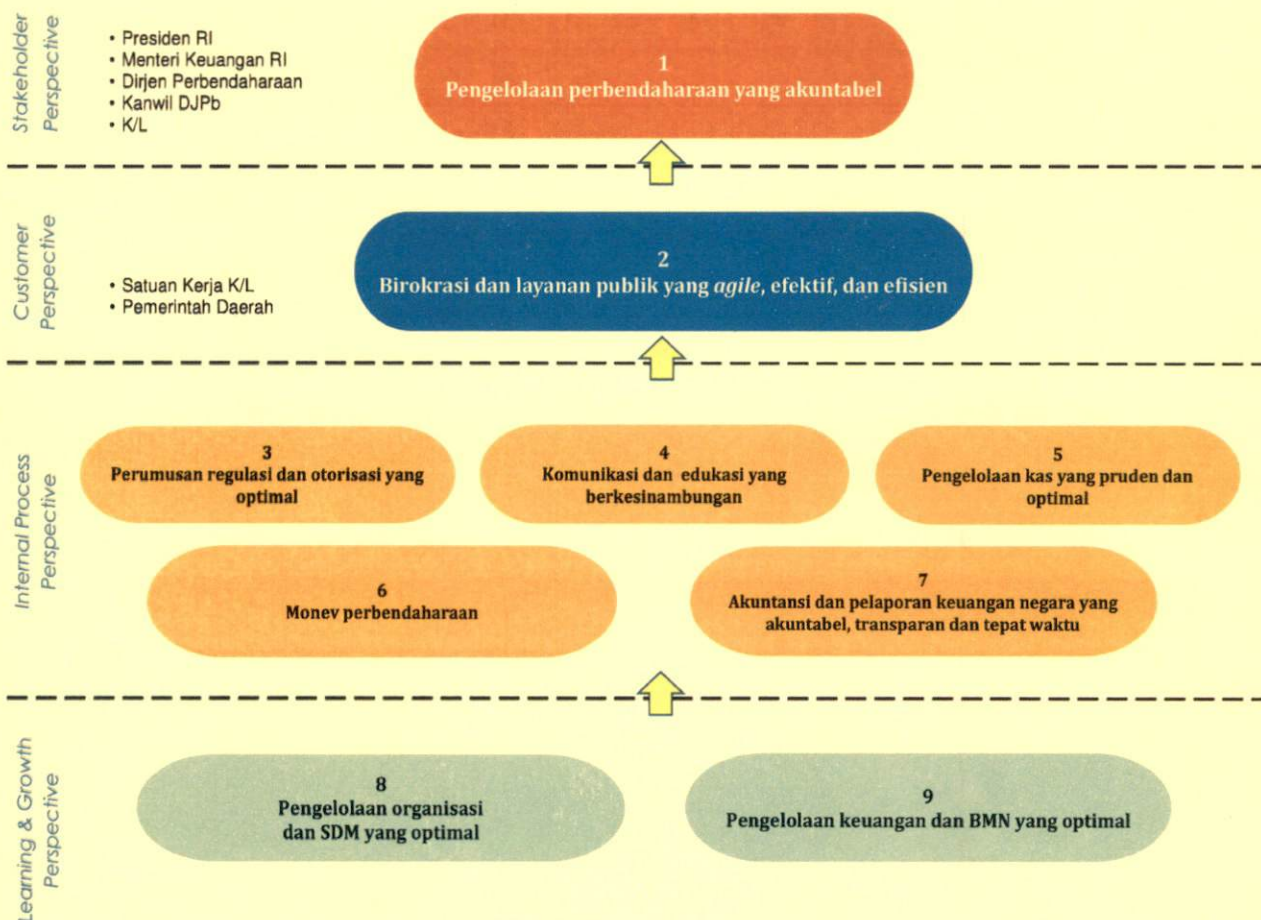
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



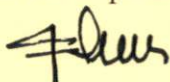
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
GORONTALO

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88
		1b-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94
		1c-CP Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,55 (skala 5)
		2b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3 (skala 4)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87
5.	Pengelolaan kas yang prudent dan optimal	5a-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%
6.	Monev perbendaharaan	6a-CP Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80
		6b-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1%
8.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	8a-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80
		8c-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83
		8d-N Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74
9.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	9a-N Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81
		9c-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%

Program/Kegiatan
 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

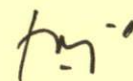
Anggaran
 (2.450.648.000)

Atasan Pimpinan Unit Kerja,



Fahma Sari Fatma
 NIP 197311041998032002

Gorontalo, 29 Januari 2020
 Pimpinan Unit Kerja,



Toni Rediyansyah
 NIP 197311161994031003

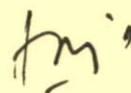
RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

Kode SS/ IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
I	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel							
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	88	88	88	88	88	88
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	94	94
1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
II	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien							
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4.55	4.55	-	4.55	-	4.55
2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)
III	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal							
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%
IV	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan							
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87	87	87	87	87	87	87
V	Pengelolaan kas yang pruden dan optimal							
5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
VI	Monev perbendaharaan							
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80	80	80	80	80	80	80
6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	20%	50%	50%	60%	60%	100%	100%
VII	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu							
7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%
VIII	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal							
8a-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	77	77

Kode SS/ IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	80	80
8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	83	83
8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	-	-	-	-	-	74	74
IX	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	-	70%	70%	-	70%	92%	92%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	81	81
9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Gorontalo, 29 Januari 2020

PNS yang dinilai,



Toni Rediyansyah
NIP 197311161994031003

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Fahma Sari Fatma	1	Nama	Toni Rediyansyah
2	NIP	197311041998032002	2	NIP	197311161994031003
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina (IV/a)
4	Jabatan	Kepala Kantor	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo

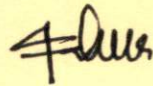
No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS OUTPUT	KUALITAS MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	-	88	100	12 bln	-
2	Mewujudkan Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	-	94	100	12 bln	-
3	Mewujudkan akurasi perencanaan kas KPPN	-	80%	100	12 bln	-
4	Mewujudkan kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4,55 (skala 5)	100	12 bln	-
5	Mewujudkan pengelolaan pengeluaran kas yang efektif	-	3 (skala 4)	100	12 bln	-
6	Mewujudkan penyelesaian SP2D secara tepat waktu	-	99,4%	100	12 bln	-
7	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87	100	12 bln	-
8	Mewujudkan LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	-	98%	100	12 bln	-
9	Memenuhi nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	-	80	100	12 bln	-
10	Mewujudkan pelaksanaan implementasi Aplikasi SAKTI	-	100%	100	12 bln	-
11	Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	-	98,1%	100	12 bln	-
12	Mewujudkan nilai rata - rata <i>hard competency</i> pegawai KPPN yang baik	-	77	100	12 bln	-
13	Mewujudkan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang baik	-	80	100	12 bln	-
14	Memenuhi nilai pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> yang berkualitas	-	83	100	12 bln	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS OUTPUT	KUALITAS MUTU	WAKTU	BIAYA
15	Mewujudkan nilai rata-rata pelaksanaan literasi perbendaharaan yang baik	-	74	100	12 bln	-
16	Mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal	-	92%	100	12 bln	-
17	Mewujudkan nilai LK tingkat UAKPA dan UAKPB yang berkualitas	-	81	100	12 bln	-
18	Mewujudkan pelaksanaan anggaran di KPPN yang berkualitas	-	95%	100	12 bln	(2.450.648.000)

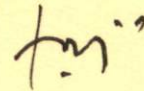
Gorontalo, 29 Januari 2020

PNS yang dinilai,

Pejabat Penilai,



Fahma Sari Fatma
NIP 197311041998032002



Toni Rediyansyah
NIP 197311161994031003

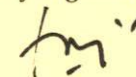
INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	SS: Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan IKU: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Optimalisasi transaksi pembayaran non tunai di tingkat KPPN	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan transaksi pembayaran non tunai tingkat KPPN Target: Minimal 70% satker wajib KPP di tingkat KPPN memiliki besaran proporsi UP Tunai $\leq$ 60%	Q1: Edukasi penggunaan, keamanan, dan pertanggung-jawaban transaksi non tunai kepada Satker	Q1: Laporan kegiatan	Januari s.d Desember 2020	Kepala KPPN	-
				Q2: Monev implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai (KKP) di tingkat KPPN	Q2: Laporan kegiatan			
				Q3: Koordinasi dengan Stakeholder (Perbankan dan KPP)	Q3: Laporan kegiatan			
				Q4: Analisis perkembangan transaksi non Tunai dalam pelaksanaan APBN di tingkat wilayah	Q4: Kajian/ Analisis			
2.	SS: Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal IKU: Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	Pelaksanaan <i>Coaching and Counseling</i>	Peningkatan kapasitas pegawai	Q1: <i>Coaching and counseling</i>	Q1: 65%	Januari s.d. Desember 2020	Kepala KPPN	-
				Q2: <i>Coaching and counseling</i>	Q2: 65%			
				Q3: <i>Coaching and counseling</i>	Q3: 65%			
				Q4: <i>Coaching and counseling</i>	Q4: 65%			
3.	SS: Monev perbendaharaan IKU: Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik (BOS) dan Dana Desa	Laporan Monev penyaluran DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Desa	Q1: Monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Desa	Q1: Laporan monev	Januari s.d Desember 2020	Seksi Bank	
				Q2: Monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Desa	Q2: Laporan monev			
				Q3: Monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Desa	Q3: Laporan monev			

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Q4: Monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Desa	Q4: Laporan monev			
4.	SS: Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal IKU: Nilai Kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	Pelaksanaan GKM dan pelatihan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang	Meningkatnya pemahaman dan kualitas dan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan barang	Q3: GKM penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang	Q4: LK UAKPA dan UAKPB	Triwulan III	Seksi MSKI	

Gorontalo, 29 Januari 2020

PNS yang dinilai,



Toni Rediyansyah

NIP 197311161994031003

ADENDUM KONTRAK KINERJA

NOMOR: 050A/PB.38/2020

Pada hari ini, telah disepakati *adendum* atas Kontrak Kinerja Nomor: 050/PB.38/2020 tanggal 29 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut :

A. Perubahan *trajectory* IKU 6b-CP Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI

Target													
Sebelum							Menjadi						
Q1	Q2	SMT 1	Q3	S.D Q3	Q4	Y	Q1	Q2	SMT 1	Q3	S.D Q3	Q4	Y
20%	50%	50%	60%	60%	100%	100%	20%	34%	34%	60%	60%	100%	100%

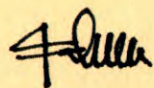
B. Penambahan mandatory inisiatif strategis Efisiensi Atas Belanja Birokrasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum								
Tidak ada inisiatif strategis efisiensi atas belanja birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan								
Menjadi								
No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal IKU: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN	Efisiensi atas belanja birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan	Tercapainya output kegiatan dengan penerapan efisiensi atas belanja birokrasi : (a) belanja bahan percetakan dan konsumsi; (b) belanja perjalanan dinas dalam negeri kecuali dalam rangka pelantikan,	1. Mencapai <i>output</i> yang telah ditetapkan di dalam DIPA TA 2020 minimal sama dengan target. 2. Melakukan penghematan	Q4: Laporan atas Efisiensi Belanja Birokrasi.	s.d Desember 2020	Kepala Subbagian Umum	Rp. 1.100.000,00

			mutasi, diklat, dan bantuan evaluasi non lokal dalam rangka pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai yang terkena dampak bencana alam (c) RDK dan konsinyering.	atas AKUN Belanja Birokrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan				
			Target : Minimal 10%					

Catatan : *Adendum* Kontrak Kinerja berlaku sejak triwulan I tahun 2020.

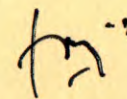
Menyetujui,
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo,



Fahma Sari Fatma

Gorontalo, 24 Juni 2020

Kepala KPPN Gorontalo,



Toni Rediyansyah

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Eselon III
Tahun Anggaran

: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo
: 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88
		1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94
		1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,55 (skala 5)
		2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3 (skala 4)
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87
5	Pengelolaan kas yang pruden dan optimal	5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%
6	Monev perbendaharaan	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80
		6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	8a-N	Nilai rata –rata hard competency pegawai	77
		8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80
		8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	83
		8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81
		9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2020

Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

Rp 2.450.648.000,-

Kepala Kantor
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo
Toni Rediyansyah

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III
Tahun Anggaran

: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo
: 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	92.59	105.22%
		1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94	99.68	106.04%
		1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%	99.83%	124.79%
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.55	4.56	100.22%
		2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3	3.68	122.67%
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	99.67%	100.27%
4	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87	91.30	104.94%
5	Pengelolaan kas yang pruden dan optimal	5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	99.82%	101.86%
6	Monev perbendaharaan	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80	96.53	120.66%
		6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100.000%	100.00%
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%	99.91%	101.85%
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77	86.83	112.77%
		8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80	99.59	124.49%
		8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	83	90.85	109.46%
		8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74	79.20	107.03%
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%	97.52%	106.00%
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81	93.30	115.19%
		9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	96.02%	101.07%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2020

Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

Rp 2.197.587.000,- (setelah revisi)

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020

Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

Rp 2.174.831.073,-

Kepala Kantor
Toni Rediyansyah



Tahun 2020

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target				Realisasi				Polarisasi	V/C*	Bobot IKU	Indeks Capaian
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Stakeholder													
1	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel												
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L			88	88			91,5	93,67	Maximize	P/L	19 %	105,21 %
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN				94				99,68	Maximize	P/M	14 %	106,04 %
1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN		80	80	80		99,48	100	100	Maximize	P/M	14 %	120 %
Customer													
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien												
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN		4,55				4,56			Maximize	E/M	21 %	100,22 %
2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas		3	3	3		3,59	3,6	3,85	Maximize	P/M	14 %	120 %
Internal Process													
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal												
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu		99,4	99,4	99,4		99,01	100	100	Maximize	P/M	14 %	100,27 %
4	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan												
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		87		87		87,6		95	Maximize	P/M	14 %	104,94 %
5	Pengelolaan kas yang pruden dan optimal												
5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98	98	98	98	99,64	100	100	99,64	Maximize	P/M	14 %	101,86 %
6	Monev perbendaharaan												
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80	80	80	80	97,78	92,22	98,08	93,04	Maximize	P/M	14 %	119,1 %
6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI		34	60	100		44	63	100	Maximize	P/M	14 %	100 %
7	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu												

7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1	98,1	98,1	98,1	100	100	99,85	99,78	Maximize	P/M	14 %	101,84 %
Learning and Growth													
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal												
8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai				77				86,83	Maximize	P/M	14 %	112,77 %
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal				80				99,59	Maximize	P/M	14 %	120 %
8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization				83				90,85	Maximize	P/M	14 %	109,46 %
8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan				74				79,2	Maximize	P/M	14 %	107,03 %
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal												
9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal		70		92		94,48		97,52	Maximize	P/M	14 %	106 %
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB				81				93,3	Maximize	P/M	14 %	115,19 %
9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN			95	95			98,72	93,32	Maximize	P/M	14 %	101,07 %
Capaian Kinerja Pegawai (CKP)													107.75%

*Validitas/Tingkat Kontrol

Kepala Kantor Pelayanan



 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGERA GORONTALO

Toni Rediyansyah, Ak., L.L.M.
NIP 197311161994031003

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE : TRIWULAN I TAHUN 2020

No.	Kode IKU	Uraian IKU	Target		Realisasi		Gap	
			Triwulan I	s.d. Triwulan I	Triwulan I	s.d. Triwulan I	Triwulan I	s.d. Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88.00	88.00	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	-
3	1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80.00%	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
4	2a-N	Indeks kepuasan sater terhadap layanan KPPN	-	-	-	-	-	-
5	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.00	3.00	N/A	N/A	N/A	N/A
6	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	99.40%	N/A	N/A	N/A	N/A
7	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.00	87.00	87.60	87.60	0.6	0.6
8	5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00%	98.00%	99.64%	99.64%	1.64%	1.64%
9	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80.00	80.00	97.78	97.78	17.78	17.78
10	6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	20.00%	20.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
11	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%	98.10%	100.00%	100.00%	1.90%	1.90%
12	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	-	-	-	-	-	-
13	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	-
14	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	-	-	-	-	-	-
15	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
16	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	-	-	-	-	-	-
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	-
18	9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.00%	95.00%	N/A	N/A	N/A	N/A

Gorontalo, 8 April 2020
Kepala Kantor,

KEPALA KANTOR PELAKSANAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Gdroni Rediyansyah


RAW DATA IKU KEMENKUL-THREE KPPN GORONTALO
KANWIL DTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
TRIMULANI TAHUN 2019

No	Kode IKU	Urutan IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	REV HAL3 MIN REAL TAG KCO RTR SPM KTR PUP DSPM Total Nilai Konversi Nilai Akhir	99,68% 80,88% 99,98% 100,00% 99,11% 0,00% 99,58% 100,00% 80,00% 97,00% 84,94% 0,00% N/A N/A	$KPA = [5\% (REV) + 5\% (HAL3) + 5\% (MIN) + 15\% (REAL) + 12\% (TAG) + 10\% (KCO) + 5\% (RTR) + 5\% (RPD) + 5\% (SPM) + 15\% (KTR) + 8\% (PUP) + 5\% (LPU) + 5\% (DSPM)] \times 100$
2	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh masing-masing Kanwil DJPP/bendaharaan	N/A	Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut Level 4 = 95-100 (Sangat Baik) Level 3 = 80-94 (Baik) Level 2 = 65-79 (Cukup) Level 1 = 0-64 (Kurang)
3	1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	Dewas Januari Dewas Februari Dewas Maret Presentase Rata-rata Dewas RPD Saker 100% - Presentase	0,62% 0,07% 0,04% 0,35% N/A	100% - (Rata - Rata Dewas RPD Imanan KPPN per periode)
4	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	Indeks hasil survei kepuasan satker		Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut 5 = Sangat Puas 4 = Puas 3 = Cukup Puas 2 = Kurang Puas 1 = Tidak Puas
5	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	SP2D yang diterbitkan SP2D yang diretur Indeks penyatuan SP2D Akurat (A) SP2D penganti indeks 1 SP2D penganti indeks 2 SP2D penganti indeks 3 SP2D penganti indeks 4 Total SP2D penganti Indeks percepatan penyelesaian Retur (B) Nilai Konversi	80,256 4,3 4 9 2 18 15 44 2,89 N/A 1,780 1,800 N/A	$(70\% \times \text{nilai indeks A}) + (30\% \times \text{nilai indeks B})$
6	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	Jumlah SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN Jumlah SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN Presentase	1,780 1,800 N/A	$\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN} \times 100\%$ $\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}$
7	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Rata-rata Indeks Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	87,6	Rata-rata Indeks Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi $0 < x \leq 20 = \text{tidak efektif}$ $20 < x \leq 40 = \text{kurang efektif}$ $40 < x \leq 60 = \text{cukup efektif}$ $60 < x \leq 80 = \text{efektif}$ $80 < x \leq 100 = \text{sangat efektif}$
8	5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	Jumlah LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Jumlah LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN Presentase	82,7 830 99,64% 10 18 30 20 20 97,78 223 223 20,00% N/A	$\sum \text{LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu} \times 100\%$ $\sum \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}$
9	6a-CP	Nilai kinerja penyusunan DAK dan Dana Desa	SYARAT PROYEKSI SPSPM MONEV LK UAKPA NKP DDO	10 18 30 20 20 97,78 223 223 20,00% N/A	$NKP DDO = (0,15 (\text{SYARAT}) + (0,20 (\text{PROYEKSI}) + 0,30 (\text{SPSPM}) + 0,15 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK UAKPA})) \times 100$
10	6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2020 Total jumlah satker yang seharusnya mengikuti tahapan implementasi SAKTI Presentase	223 223 20,00% N/A	Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2020 Total jumlah satker yang ditetapkan mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2019 $\times \text{Proporsi Tahapan} \times 100\%$

No	Kode IKU	Urutan IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
11	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan akurat	Jumlah sakor yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu (A) Jumlah sakor yang memiliki nilai suspensi (seluruh) belajar tidak melebihi batas suspensi dan status BAR sudah diandatangani oleh KPA dan Kepala Seksi Vera (B) Jumlah sakor aktif pada periode berkenaan (C) Persentase	245 245 100%	$50\% \left(\frac{a}{c} \right) + 50\% \left(\frac{b}{c} \right)$ Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency
12	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	Rata-rata		
13	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepaluhan internal	Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPB		Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepaluhan internal terdiri atas: 1. Laporan penerapan manajemen risiko (bobot 35%) 2. Laporan pemantauan pengendalian risiko (bobot 35%) 3. Laporan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai (bobot 20%) 4. Tidak terdapat rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional dan laporan pengelolaan pengaduan (bobot 10%) Penilaian difokuskan berdasarkan parameter sebagai berikut: a. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2020 b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2019
14	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPB		Tahapan 1. penguatan proses literasi. Nilai diperoleh dari nilai e-learning dengan bobot 25%. Tahapan 2. penguatan konten. Nilai diperoleh dari nilai training (HTT) dengan bobot 35%. Tahapan 3. penyusunan tulisan. Nilai diperoleh dari nilai tulisan yang telah dikirimkan dan/atau dipublikasikan dengan bobot 40%.
15	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	Rata-rata nilai literasi yang dicapai oleh pejabat eselon IV di KPPN.		
16	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	Hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BMN yang optimal oleh Kantor Pusat DJPB		
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB		Penilaian laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB meliputi kriteria: a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan b) Keakuratan data laporan keuangan c) Kepastian pelaksanaan anggaran d) Penyajian Laporan Keuangan e) Partisipasi dan f) Laporan BMN
18	9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	Capaian Keuangan Efisiensi Konsistensi Penyerapan anggaran atas pagu netto Penyampaian laporan Penyampaian data kontrak Pengelolaan LP Pencapaian ka Penyampaian LPJ Pengomitalian SPJ Revisi SP2D Revisi DIPA Pagu Mulus Dispersasi SPM Total Nilai Total Bobot Nilai KPA	99,19% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 43,92% 44% N/A	Realisasi IKU = [(% capaian keuangan x 30%) + (% efisiensi x 15%) + (% konsistensi x 10%) + (% penyerapan anggaran atas pagu netto x 15%)] + [(% penyelesaian laporan x 4%) + (% penyampaian data kontrak x 3%) + (% pengelolaan LP x 4%) + (% pencapaian kas x 2%) + (% penyampaian LPJ x 2%) + (% pengomitalian SPJ x 3%) + (% revisi SP2D x 3%) + (% revisi DIPA x 5%) + (% pagu minus x 2%) + (% dispersasi SPM x 2%)] (% dispersasi SPM x 2%)

Keterangan:
*) Matriks perhitungan realisasi IKU terlampir



LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE : Triwulan II TAHUN 2020

No.	Kode IKU	Uraian IKU	Target		Realisasi		Gap	
			Triwulan II (4)	s.d. Triwulan II (5)	Triwulan II (6)	s.d. Triwulan II (7)	Triwulan II (8)	s.d. Triwulan II (10)
(1)	(2)	(3)						
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88,00	88,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	-
3	1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80,00%	80,00%	99,48	99,48	N/A	N/A
4	2a-N	Indeks kepuasan sakter terhadap layanan KPPN	4,55	4,55	-	-	-	-
5	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,00	3,00	3,59	3,59	0,59	0,59
6	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99,40%	99,01%	99,01%	-0,39%	-0,39%
7	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,00	87,00	87,60	87,60	0,60	0,60
8	5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,00%	98,00%	100,00%	100,00%	2,00%	2,00%
9	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80,00	80,00	97,22	97,22	1722,00%	1722,00%
10	6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	34,00%	34,00%	44,00%	44,00%	10,00%	10,00%
11	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,10%	98,10%	N/A	N/A	-	-
12	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	-	-	-	-	-	-
13	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	-
14	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	-	-	-	-	-	-
15	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
16	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	70%	70%	94,48%	94,48%	24,48%	24,48%
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	-
18	9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,00%	95,00%	N/A	N/A	N/A	N/A

KORONTALO, 3 Juli 2020
Kepala Kantor,

Toni Rediyansyah
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
GORONTALO

RAW DATA IKU KEMENKEU-THREE KPPN GORONTALO
KANWIL DIJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
TRIWULAN II TAHUN 2020

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	REV HAL3 MIN REAL TAG KCO RTR RPD SPM KTR LPU DSPM Total Nilai Konversi Nilai Akhir	100.00% 73.33% 99.84% 100.00% 92.27% 0.00% 99.60% 91.4% 80.00% 58.22% 75.20% 40.13% 100.00% N/A N/A	KIPA= (5% (REV) + 5% (HAL3) + 5% (MIN) + 15% (REAL) + 12% (TAG) + 10% (KCO) + 5% (RTR) + 5% (RPD) + 5% (SPM) + 15% (KTR) + 8% (PUP) + 5% (LPU) + 5% (DSPM)) x 100 Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut : Level 4 = 95-100 (Sangat Baik) Level 3 = 80-94 (Baik) Level 2 = 65-79 (Cukup) Level 1 = 0-64 (Kurang)
2	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh masing-masing Kanwil DJPbPerbendaharaan		
3	1c-CP	Presentase akurasi perencanaan kas KPPN	Dewasi April Dewasi Mei Dewasi Juni Presentase Rata-rata Dewasi RPD Saker 100% - Presentase	0.88% 0.19% 0.47% 0.52% 99.48%	100% - (Rata - Rata Dewasi RPD harian KPPN per periode)
4	2a-N	Indeks kepuasan sakter terhadap layanan KPPN	Indeks hasil survei kepuasan sakter		
5	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	SP2D yang diterbitkan SP2D yang ditelusur Indeks penyaluran SP2D Akurat (A) SP2D pengganti indeks 1 SP2D pengganti indeks 2 SP2D pengganti indeks 3 SP2D pengganti indeks 4 Total SP2D pengganti Indeks kecepatan penyelesaian Retur (B) Nilai Konversi Jumlah SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN Jumlah SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN Presentase	122 37 4 10 7 7 13 37 2.62 3.59 101 102 99.01%	Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut : 5 = Sangat Puas 4 = Puas 3 = Cukup Puas 2 = Kurang Puas 1 = Tidak Puas (70% x nilai indeks A) + (30% x nilai indeks B) $\sum$ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN X 100% $\sum$ SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN X 100% Rata-rata Indeks Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 0 < x ≤ 20 = tidak efektif 20 < x ≤ 40 = kurang efektif 40 < x ≤ 60 = cukup efektif 60 < x ≤ 80 = efektif 80 < x ≤ 100 = sangat efektif
6	3a-N	Presentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	Rata-rata Indeks Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi		
7	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Rata-rata Indeks Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi		
8	5a-N	Presentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	Jumlah LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Jumlah LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN Presentase	813 813 100.00%	$\sum$ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu X 100 % $\sum$ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN
9	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	SYARAT PROVEKSI SPSPPM MONEV LK UAKPA NKP DDD	14.69 17.53 30 15 20 97.22	NKP DDD = (1.15 (SYARAT) + (0.20 (PROVEKSI) + 0.30 (SPSPPM) + 0.15 (MONEV) + 0.20 (LK-UAKPA)) x 100;
10	6b-CP	Presentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	Jumlah sakter yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Total Jumlah sakter yang seharusnya mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4	223 223 NA 6% 6% 8%	X Proposal Tahapan X 100%

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
11	7a-N	Persentase rekonstruksi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	Jumlah saker yang melakukan upload data ke E-Rekan secara tepat waktu (A) Jumlah saker yang memiliki nilai suspen (selain) biaya tidak melebihi ambang batas suspen dan status BAR sudah diidentifikasi oleh KPA dan Kepala Seksi Vera (B) Jumlah saker aktif pada periode berkenaan (C)	245 245 N/A	$55\% \left(\frac{A}{C} \right) + 5\left(\frac{B}{C} \right)$ Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai Jumlah pegawai KPPN yang memiliki tes hard competency
12	8a-N	Nilai rata –rata hard competency pegawai	Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai Rata-rata	-	Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai Jumlah pegawai KPPN yang memiliki tes hard competency
13	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPB	-	Unsus-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas: 1. Laporan pemantauan manajemen risiko (bobot: 35%) 2. Laporan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%) 3. Laporan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%) 4. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional dan laporan pengendalian pengaduan (bobot: 10%)
14	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPB	-	Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: a. Nilai kuantitatif pemantauan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2020 b. Nilai IKKO Unit periode tahunan 2019
15	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Pembelajaran	Rata-rata nilai literasi yang dicapai oleh pejabat eselon IV di KPPN.	-	Tahapan 1, penguatan proses literasi: Nilai diperoleh dari nilai e-learning dengan bobot 25% Tahapan 2, penguatan konten: Nilai diperoleh dari nilai training (IHT) dengan bobot 35% Tahapan 3, penyusunan tulisan: Nilai diperoleh dari nilai tulisan yang telah dikirimkan dan/atau dipublikasikan dengan bobot 40%.
16	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	Hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BMN yang optimal oleh Kantor Pusat DJPB	94,48	Hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BMN yang optimal oleh Kantor Pusat DJPB
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB	-	Penilaian laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB meliputi kriteria: a) Kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan b) Keakuratan data laporan keuangan c) Keakuratan pelaksanaan anggaran d) Penyaliran laporan keuangan e) Laporan BMN f) Laporan BMN
18	9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	Capaian Keluaran Efisiensi Konsistensi Penyerapan anggaran atas pagu netto Penyelesaian tagihan Penempatan data kontrak Pengendalian UP Perencanaan ka Penyempurnaan LPU Pembetulan SPN Revisi SP2D Revisi DIPA DIPA minus SPN DIPA minus SPN Total Nilai Total Bobot Nilai IKPA	- - 98,60% 100% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 43,80% 44% N/A	Realisasi IKU = $\left(\frac{(\% \text{ capaian keluaran} \times 30\%) + (\% \text{ efisiensi} \times 15\%) + (\% \text{ konsistensi} \times 10\%) + (\% \text{ penyerapan anggaran atas pagu netto} \times 15\%)}{44\%} \right) +$ $\left(\frac{(\% \text{ penyelesaian tagihan} \times 4\%) + (\% \text{ penempatan data kontrak} \times 3\%) + (\% \text{ pengendalian UP} \times 4\%) + (\% \text{ perencanaan} \times 2\%) + (\% \text{ penyempurnaan LPU} \times 2\%) + (\% \text{ pembetulan SPN} \times 3\%) + (\% \text{ revisi SP2D} \times 3\%) + (\% \text{ revisi DIPA} \times 5\%) + (\% \text{ DIPA minus SPN} \times 2\%) + (\% \text{ DIPA minus SPN} \times 2\%)}{44\%} \right)$

Keterangan:
 1. Matriks perhitungan realisasi IKU terlampir



LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
PERIODE : TRIWULAN III TAHUN 2020

No.	Kode IKU	Uraian IKU	Target		Realisasi		Gap	
			TRIWULAN III	s.d. TRIWULAN III	TRIWULAN III	s.d. TRIWULAN III	TRIWULAN III	s.d. TRIWULAN III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88.00	88.00	91.50	91.50	3.50	3.50
2	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	-
3	1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80.00%	80.00%	100.00	100.00	99.20	99.20
4	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.55	4.55	4,56	4,56	0.01	0.01
5	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.00	3.00	3,6	3,6	0.60	0.60
6	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	99.40%	100.00%	100.00%	0.01	0.01
7	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	-
8	5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00%	98.00%	100.00%	100.00%	0.02	0.02
9	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80.00	80.00	98.08	98.08	18.08	18.08
10	6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	60.00%	60.00%	63.00%	63.00%	0.03	0.03
11	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%	98.10%	99.85%	99.85%	0.02	0.02
12	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	-	-	-	-	-	-
13	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	-
14	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	-	-	-	-	-	-
15	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
16	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	-	-	-	-	-	-
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	-
18	9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.00%	95.00%	98.72%	98.72%	0.04	0.04

Kepala Kantor,



RAW DATA IKU KEMENKEU-THREE KPPN GORONTALO
KANWIL DJPb PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
TRIWULAN III TAHUN 2020

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	REV HAL3 MIN REAL TAG KCO RTR RPD SPM KTR PUP LPJ DSPM Total Nilai Konversi Nilai Akhir	- - 99.37% 100.00% 97.84% 92.38% 99.71% 98.57% 80.00% 72.07% 94.85% 81.76% 100.00% 82.53% 90.00% 91.50	IKPA = [5% (REV) + 5% (HAL3) + 5% (MIN) + 15% (REAL) + 12% (TAG) + 10% (KCO) + 5% (RTR) + 5% (RPD) + 5% (SPM) + 15% (KTR) + 8% (PUP) + 5% (LPJ) + 5% (DSPM)] x 100
2	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh masing-masing Kanwil DJPbPerbendaharaan	-	Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut : Level 4 = 95-100 (Sangat Baik) Level 3 = 80-94 (Baik) Level 2 = 65-79 (Cukup) Level 1 = 0-64 (Kurang)
3	1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	Deviasi Juli Deviasi Agustus Deviasi September Presentase Rata-rata Deviasi RPD Satker 100% - Presentase	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%	100% - (Rata - Rata Deviasi RPD harian KPPN per periode)
4	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	Indeks hasil survei kepuasan satker	4.56	Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut : 5 = Sangat Puas 4 = Puas 3 = Cukup Puas 2 = Kurang Puas 1 = Tidak Puas
5	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	SP2D yang diterbitkan SP2D yang disetujui Indeks penyaluran SP2D Akurat (A) SP2D pengganti indeks 1 SP2D pengganti indeks 2 SP2D pengganti indeks 3 SP2D pengganti indeks 4 Total SP2D pengganti Indeks kecepatan penyelesaian Retur (B) Nilai Konversi	119.606 78 4 1 42 16 19 78 2.68 3.6	(70% x nilai indeks A) + (30% x nilai indeks B)
6	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	Jumlah SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN Jumlah SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN Persentase	1.602 1.602 100.00%	$\frac{\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}}{\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}} \times 100\%$
7	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Rata-rata Indeks Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	-	Rata-rata Indeks Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 0 < x ≤ 20 = tidak efektif 20 < x ≤ 40 = kurang efektif 40 < x ≤ 60 = cukup efektif 60 < x ≤ 80 = efektif 80 < x ≤ 100 = sangat efektif
8	5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	Jumlah LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Jumlah LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN Persentase	813 813 100.00%	$\frac{\sum \text{LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100\%$
9	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	SYARAT PROYEKSI SPPPSPM MONEV LK UAKPA NKP DDD	N/A 19.87 29.17 15 19.33 98.09	NKP DDD = [0,15 (SYARAT) + (0,20 (PROYEKSI) + 0,30 (SPPPSPM) + 0,15 (MONEV) + 0,20 (LK-UAKPA)] x 100
10	6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Total Jumlah satker yang seharusnya mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6 Tahap 7 Tahap 8 Tahap 9 Tahap 10 Persentase	223 223 NA 6% 6% 8% NA 20% 4% 4% 5% 10% 63.00%	Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2020 X Proporsi Tahapan X 100%

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
11	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu (A) Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (sefish) belanja tidak melebihi ambang batas suspen dan status BAR sudah ditandatangani oleh KPA dan Kepala Seksi Vera (B) Jumlah satker aktif pada periode berkenaan (C) Persentase	679 1 689 99.85%	$50\% \left(\frac{a}{c}\right) + 50\% \left(\frac{b}{c}\right)$
12	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency Rata-rata	- - -	Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency
13	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPB	-	Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas: 1. Laporan penerapan manajemen risiko (bobot: 35%) 2. Laporan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%) 3. Laporan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%) 4. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional dan laporan pengelolaan pengaduan (bobot: 10%)
14	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPB	-	Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: a. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2020. b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2019.
15	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	Rata-rata nilai literasi yang dicapai oleh pejabat eselon IV di KPPN.	-	Tahapan 1, penguatan proses literasi. Nilai diperoleh dari nilai e-learning dengan bobot 25%. Tahapan 2, penguatan konten. Nilai diperoleh dari nilai training (IHT) dengan bobot 35%. Tahapan 3, penyusunan tulisan. Nilai diperoleh dari nilai tulisan yang telah dikirimkan dan/atau dipublikasikan dengan bobot 40%.
16	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	Hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BMN yang optimal oleh Kantor Pusat DJPB	-	Hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BMN yang optimal oleh Kantor Pusat DJPB
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB	-	Penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB meliputi kriteria: a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan b) keakuratan data laporan keuangan c) kepatuhan pelaksanaan anggaran d) Penyajian Laporan Keuangan e) Partisipasi dan f) Laporan BMN.
18	9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	Capaian Keluaran Efisiensi Penyerapan Anggaran Revisi DIPA Halaman 3 DIPA Pagu Minus Data Kontrak Pengelolaan UP TUP LPJ Bendahara Dispensasi SPM Penyerapan Anggaran Penyelesaian tagihan Konfirmasi capaian output Retur SP2D Renkas Kesalahan SPM Total Nilai Total Bobot Nilai IKPA	- - - - - 98.35% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 53.63% 58% 98.72%	Realisasi IKU = [(% capaian keluaran x 30%) + (% efisiensi x 15%) + (% konsistensi x 10%) + (% penyerapan anggaran atas pagu netto x 15%)] + [(% penyelesaian tagihan x 4%) + (% penyampaian data kontrak x 3%) + (% pengelolaan UP x 4%) + (% perencanaan kas x 2%) + (% penyampaian LPJ x 2%) + (% pengembalian SPM x 3%) + (% retur SP2D x 3%) + (% revisi DIPA x 5%) + (% pagu minus x 2%) + (% dispensasi SPM x 2%)]

Keterangan:

*) Matriks perhitungan realisasi IKU terlampir.



LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT : KPPN GORONTALO
JABATAN : KEPALA KANTOR
PERIODE : S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2020

No.	Kode IKU	Uraian IKU	Q1		Q2		Smt I		Q3		s.d Q3		Q4		Y	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	N/A	88	N/A	88	N/A	88.00	91.50	88.00	91.50	88.00	93.67	88.00	92.59
2	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.00	99.68	94.00	99.68
3	1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%	N/A	80%	99.48%	80%	99.48%	80%	100.00%	80%	99.74%	80%	100.00%	80%	99.83%
4	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	-	4.55	4.56	4.55	4.56	-	-	4.55	4.56	-	-	4.55	4.56
5	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3	N/A	3	3.59	3	3.59	3	3.60	3	3.60	3	3.850	3	3.68
6	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	N/A	99.40%	99.01%	99.40%	99.01%	99.40%	100.00%	99.40%	99.51%	99.40%	100.00%	99.40%	99.67%
7	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	87	87.6	87	87.6	-	-	87	87.6	87	95.00	87	91.30
8	5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00%	99.64%	98.00%	100	98.00%	99.82%	98.00%	100.00%	98.00%	99.88%	98.00%	99.64%	98.00%	99.82%
9	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80	97.78	80	97.22	80	97.5	80	98.08	80	97.69	80	93.04	80	96.53
10	6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	20%	N/A	34%	54%	34%	54%	60.00%	63.00%	60.00%	63.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
11	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%	100.00%	98.10%	100.00%	98.10%	100.00%	98.10%	99.85%	98.10%	99.93%	98.10%	99.78%	98.10%	99.91%
12	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00	86.83	77.00	86.83
13	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	99.59	80.00	99.59
14	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	90.85	83.00	90.85
15	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.00	79.20	74.00	79.20
16	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	-	-	70.00%	94.48%	70.00%	94.48%	-	-	70.00%	94.48%	92.00%	97.52%	92.00%	97.52%
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.00	93.30	81.00	93.30
18	9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.00%	N/A	95.00%	N/A	95.00%	N/A	95.00%	98.72%	95.00%	98.72%	95.00%	93.30%	95.00%	96.02%

Mengetahui,
MMKO

Rahmat Kurniawan

Gorontalo, 6 Januari 2021

Kepala Kantor,

Toni Rediyansyah



RAW DATA IKU KEMENKEU-THREE KPPN GORONTALO
KANWIL DJPb PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO
TRIWULAN IV TAHUN 2020

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
1	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	REV	0.00%	$IKPA = [5\% (REV) + 5\% (HAL3) + 5\% (MIN) + 15\% (REAL) + 12\% (TAG) + 10\% (KCO) + 5\% (RTR) + 5\% (RPD) + 5\% (SPM) + 15\% (KTR) + 8\% (PUP) + 5\% (LPJ) + 5\% (DSPM)] \times 100$
			HAL3	0.00%	
			MIN	4.96%	
			REAL	15.00%	
			TAG	11.74%	
			KCO	9.79%	
			RTR	4.99%	
			RPD	100.00%	
			SPM	4.25%	
			KTR	12.66%	
			PUP	7.44%	
			LPJ	3.83%	
			DSPM	5.00%	
			Total Nilai	83.31%	
			Konversi	90.00%	
			Nilai Akhir	93.67	
2	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh masing-masing Kanwil DJPbPerbendaharaan	99.68%	Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut : Level 4 = 95-100 (Sangat Baik) Level 3 = 80-94 (Baik) Level 2 = 65-79 (Cukup) Level 1 = 0-64 (Kurang)
3	1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	Deviasi RPD Oktober	0.00%	$100\% - (80\% \text{ Rata - Rata Deviasi RPD harian KPPN per periode} + 20\% \text{ Rata-Rata Deviasi PPDH Harian KPPN Per Periode})$
			Deviasi RPD November	0.00%	
			Deviasi RPD Desember	0.00%	
			Presentase Rata-rata Deviasi RPD Satker	0.00%	
			Deviasi PPDH Oktober	0.00%	
			Deviasi PPDH November	0.00%	
			Deviasi PPDH Desember	0.00%	
			Presentase Rata-rata Deviasi PPDH Satker	0.00%	
4	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	Indeks hasil survei kepuasan satker	4.56	Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut : 5 = Sangat P 4 = Puas 3 = Cukup P 2 = Kurang P 1 = Tidak Pu
5	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	SP2D yang diterbitkan	127,589	(70% x nilai indeks A) + (30% x nilai indeks B)
			SP2D yang diretur	63	
			Indeks penyaluran SP2D Akurat (A)	4	
			SP2D pengganti indeks 1	3	
			SP2D pengganti indeks 2	2	
			SP2D pengganti indeks 3	19	

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
			SP2D pengganti indeks 4	39	
			Total SP2D pengganti	63	
			Indeks kecepatan penyelesaian Retur (B)	3.49	
			Nilai Konversi	3.85	
6	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	Jumlah SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN	788	SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN $\times 100\%$
			Jumlah SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN	788	
			Persentase	100.00%	
7	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Rata-rata Indeks Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	95	Rata-rata Indeks Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi $0 < x \leq 20$ = tidak efektif $20 < x \leq 40$ = kurang efektif $40 < x \leq 60$ = cukup efektif $60 < x \leq 80$ = efektif $80 < x \leq 100$ = sangat efektif
8	5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	Jumlah LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	819	$\sum$ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu $\times 100\%$ $\sum$ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN
			Jumlah LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN	822	
			Persentase	99.64%	
9	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	SYARAT	N/A	NKP DDD = $[0,15 (\text{SYARAT}) + (0,20 (\text{PROYEKSI}) + 0,30 (\text{SPPSPM}) + 0,15 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA})] \times 100$
			PROYEKSI	20	
			SPPSPM	30	
			MONEV	9.75	
			LK UAKPA	19.33	
			NKP DDD	93.04	
10	6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI		Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahun 2020 $\times$ Proporsi Tahapan $\times 100\%$
			Total Jumlah satker yang seharusnya mengikuti tahapan implementasi SAKTI		
			Tahap 1	N/A	
			Tahap 2	6%	
			Tahap 3	6%	
			Tahap 4	8%	
			Tahap 5	N/A	
			Tahap 6	30%	
			Tahap 7	4%	
			Tahap 8	4%	
			Tahap 9	5%	
			Tahap 10	10%	
			Tahap 11	10%	
			Tahap 12	10%	
			Tahap 13	7%	
			Persentase	100.00%	
11	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu (A)	681	$50\% \left(\frac{a}{c} \right) + 50\% \left(\frac{b}{c} \right)$
			Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen dan status BAR sudah ditandatangani oleh KPA dan Kepala Seksi Vera (B)	678	
			Jumlah satker aktif pada periode berkenaan (C)	681	
			Persentase	99.78%	
12	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai	1042	Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency
			Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency	12	
			Rata-rata	86.83	

No	Kode IKU	Uraian IKU	Data yang diperlukan	Data KPPN	Keterangan
13	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb	99.59	1. Laporan penerapan manajemen risiko (bobot: 35%) 2. Laporan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%) 3. Laporan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%) 4. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional dan laporan Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: a. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2020.
14	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat DJPb	90.85%	Tahapan 1. penguatan proses literasi. Nilai diperoleh dari nilai e-learning dengan bobot Tahapan 2. penguatan konten. Nilai diperoleh dari nilai training (IHT) dengan bobot Tahapan 3. penyusunan tulisan. Nilai diperoleh dari nilai tulisan yang telah dikirimkan dan/atau diublikasikan dengan bobot 40%.
15	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	Rata-rata nilai literasi yang dicapai oleh pejabat eselon IV di KPPN.	79.2	Hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BMN yang optimal oleh Kantor Pusat DJPb
16	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	Hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BMN yang optimal oleh Kantor Pusat DJPb	97.52	Penilaian Laporan Keuangan tingkat I IAKPA dan I IAKPR melalui kriteria: a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan b) keakuratan data laporan keuangan c) kepatuhan pelaksanaan anggaran d) Penyajian Laporan Keuangan
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB	93.3%	
18	9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	Capaian Keluaran Efisiensi Konsistensi Penyerapan Anggaran Revisi DIPA Halaman 3 DiPA Pagu Minus Data Kontrak Pengelolaan UP TUP LPJ Bendahara Dispensasi SPM Penyerapan Anggaran Penyelesaian tagihan Konfirmasi capaian output Retur SP2D Renkas Kesalahan SPM Bobot SMART Bobot IKPA Nilai IKPA	100% 6.26% 98.15% 98.96% 199% 98.16% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 85.00% 53.84% 39.48% 93.32%	Realisasi IKU = 40% Bobot IKPA + 60% Bobot SMART

Keterangan:

*) Matriks perhitungan realisasi IKU terlampir



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN PERBENDAHARAAN 08

WILAYAH/PROVINSI : GORONTALO 3100

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO 528281

Kode Lap : LRA.F.S

Tanggal : 11/01/21 9:14 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	332,380,000	331,209,000	1,171,000	100	341,485,000	326,655,000	14,830,000	96
	BELANJA BARANG	1,673,543,000	1,652,065,073	21,477,927	99	1,980,181,000	1,979,664,795	516,205	100
	BELANJA MODAL	191,664,000	191,557,000	107,000	100	32,124,000	31,385,000	739,000	98
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	2,197,587,000	2,174,831,073	22,755,927	99	2,353,790,000	2,337,704,795	16,085,205	99
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 ESELON I : 08
 WILAYAH/PROVINSI : 026
 SATUAN KERJA : 528281
 JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN PERBENDAHARAAN
 KANWIL GORONTALO
 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

Kode Lap : LRA.B.S.
 Tanggal : 10/01/21 9:04 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun --
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	181,032,000	183,980,000	183,829,000	0	183,829,000	99.92	151,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	181,032,000	183,980,000	183,829,000	0	183,829,000	99.92	151,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	120,900,000	148,400,000	147,380,000	0	147,380,000	99.31	1,020,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	120,900,000	148,400,000	147,380,000	0	147,380,000	99.31	1,020,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	301,932,000	332,380,000	331,209,000	0	331,209,000	99.65	1,171,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	405,862,000	443,712,000	443,609,883	0	443,609,883	99.98	102,117
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000	7,740,000	7,735,500	0	7,735,500	99.94	4,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	138,960,000	135,250,000	135,250,000	0	135,250,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	72,552,000	73,827,000	73,813,429	0	73,813,429	99.98	13,571
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	2,000,000	1,745,000	0	1,745,000	87.25	255,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	647,374,000	662,529,000	662,153,812	0	662,153,812	99.94	375,188
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	198,602,000	81,457,000	81,449,269	0	81,449,269	99.99	7,731
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11,760,000	8,172,000	8,160,000	0	8,160,000	99.85	12,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	53,766,000	3,000	0	0	0	0	3,000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	0	62,645,000	46,433,969	0	46,433,969	74.12	16,211,031
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	264,128,000	152,277,000	136,043,238	0	136,043,238	89.34	16,233,762
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	102,000,000	8,610,000	8,608,000	0	8,608,000	99.98	2,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	102,000,000	8,610,000	8,608,000	0	8,608,000	99.98	2,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	252,000,000	186,050,000	186,042,291	0	186,042,291	100	7,709
522112	Belanja Langganan Telepon	15,000,000	12,270,000	12,267,972	0	12,267,972	99.98	2,028
522113	Belanja Langganan Air	21,000,000	12,350,000	12,333,915	0	12,333,915	99.87	16,085
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,700,000	8,000,000	7,977,833	0	7,977,833	99.72	22,167
522141	Belanja Sewa	14,000,000	0	0	0	0	0	0
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	308,300,000	218,671,000	218,622,011	0	218,622,011	99.98	48,989
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	236,357,000	274,818,000	274,810,132	0	274,810,132	100	7,868

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08
WILAYAH/PROVINSI : 026
SATUAN KERJA : 528281
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN
KANWIL GORONTALO
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 10/01/21 9:04 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	218,880,000	232,132,000	232,131,678	0	232,131,678	100	322
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	0	34,234,000	34,232,000	0	34,232,000	99.99	2,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	455,237,000	541,184,000	541,173,810	0	541,173,810	100	10,190
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	101,320,000	39,213,000	36,389,202	0	36,389,202	92.8	2,823,798
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,550,000	10,658,000	8,700,000	0	8,700,000	81.63	1,958,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46,143,000	40,401,000	40,375,000	0	40,375,000	99.94	26,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	180,013,000	90,272,000	85,464,202	0	85,464,202	94.67	4,807,798
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,957,052,000	1,673,543,000	1,652,065,073	0	1,652,065,073	98.72	21,477,927
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191,664,000	191,664,000	191,557,000	0	191,557,000	99.94	107,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	191,664,000	191,664,000	191,557,000	0	191,557,000	99.94	107,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	191,664,000	191,664,000	191,557,000	0	191,557,000	99.94	107,000
	JUMLAH BELANJA	2,450,648,000	2,197,587,000	2,174,831,073	0	2,174,831,073	98.96	22,755,927

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08
WILAYAH/PROVINSI : 026
SATUAN KERJA : 528281
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN
KANWIL GORONTALO
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/01/21 9:15 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	2,000,000	1,745,000	0	1,745,000	87.25	255,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	2,000,000	1,745,000	0	1,745,000	87.25	255,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	0	62,645,000	46,433,969	0	46,433,969	74.12	16,211,031
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	62,645,000	46,433,969	0	46,433,969	74.12	16,211,031
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	64,645,000	48,178,969	0	48,178,969	74.53	16,466,031
	JUMLAH BELANJA	0	64,645,000	48,178,969	0	48,178,969	74.53	16,466,031